

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**PENGARUH TINGKAT PDRB, INFLASI DAN JUMLAH  
TENAGA KERJA INDUSTRI BESAR SEDANG  
TERHADAP PAD DI EKS KARESIDENAN PATI  
(KABUPATEN BLORA, REMBANG, PATI, KUDUS, JEPARA)**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelara Magister Manajemen**

**Disusun Oleh :**

**AGUS SLAMET RUPINGI**

**NIM. 500581394**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**JAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

PENGARUH TINGKAT PDRB, INFLASI DAN JUMLAH TENAGA KERJA  
INDUSTRI BESAR SEDANG TERHADAP PAD DI EKS KARESIDENAN  
PATI (KABUPATEN BLORA, REMBANG, PATI, KUDUS, JEPARA)

Agus Slamet Rupingi  
[agusruping@gmail.com](mailto:agusruping@gmail.com)

Program Pasca Sarjana  
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat PDRB, Inflasi dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang Terhadap penerimaan PAD di Eks Karesidenan Pati (Kabupaten Blora, Rembang, Pati, Kudus dan Jepara). Populasi penelitian adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan sampelnya adalah 5 kabupaten di Eks Karesidenan Pati, dimana pada rentang waktu tahun tersebut terjadi perkembangan sektor industri pengolahan yang cukup besar. Metode analisis yang digunakan adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS) dengan data sekunder *time series* antara tahun 2002 sampai dengan 2013 yaitu data PAD, PDRB, Inflasi dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten maupun BPS Provinsi Jawa Tengah. Alat bantu perangkat lunak dalam pengolahan data adalah program SPSS versi 17 dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak tingkat PDRB, Inflasi dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang berpengaruh terhadap PAD secara signifikan. Secara parsial tingkat PDRB berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang berpengaruh signifikan dan negatif terhadap PAD. Sedangkan dari nilai korelasi parsial PDRB terhadap PAD sebesar 0,556 menunjukkan bahwa hubungan variabel tersebut cukup kuat dan positif dengan koefisien determinasi parsial sebesar 0,3091 yang berarti bahwa PAD mampu dijelaskan oleh variabel PDRB sebesar 30,91 persen. Nilai korelasi parsial inflasi dan PAD sebesar -0,213 menunjukkan bahwa hubungan variabel tersebut sangat lemah dan negatif dengan koefisien determinasi parsial sebesar 0,0454 yang berarti bahwa PAD hanya mampu dijelaskan oleh variabel inflasi sebesar 4,54 persen. Sedangkan nilai korelasi parsial variabel jumlah tenaga kerja industri besar sedang dengan PAD sebesar -0,405 menunjukkan bahwa hubungan variabel tersebut kurang kuat dan negatif dengan koefisien determinasi parsial sebesar 0,1640 yang berarti bahwa PAD mampu dijelaskan oleh variabel jumlah tenaga kerja industri besar sedang sebesar 16,40 persen. Variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi PAD adalah variabel PDRB, karena variabel ini mempunyai nilai koefisien regresi yang terstandar adalah yang paling besar yaitu sebesar 0,766 dibandingkan dengan nilai koefisien regresi yang terstandarkan kedua variabel yang lain.

Kata kunci : PAD, PDRB, Inflasi, Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang

## ABSTRACT

*The effect of the Gross Regional Domestic Product (GRDP), Inflation and Workers Number of Large Medium Manufacturing Industry Against to the Acceptance of Regency Actual Revenues (RAR) in Ex Pati Residency*

Agus Slamet Rupingi  
[agusruping@gmail.com](mailto:agusruping@gmail.com)

Graduate Studies Program  
 Indonesia Open University

*This study aims to determine the effect of the GRDP, Inflation and Workers Number of Large Medium Manufacturing Industry Against Ex acceptance of RAR in Pati Residency (Regency of Blora, Rembang, Pati, Kudus and Jepara). The study population was 35 regencies/cities in Central Java Province, while the sample is 5 regencies in Ex Pati Residency, where in the period of the year there is a progress in the manufacturing industry sector that is quite large. The analytical method used was Ordinary Least Square (OLS) with secondary data time series between 2002 to 2013 that is data of RAR, the GRDP, Inflation and Workers Number of Large Medium Manufacturing Industry gained from the publication of the BPS Regency and BPS Province of Central Java. Software tools used to process the data was SPSS version 17 using linear regression. The results shows that simultaneously the level of the GRDP, Inflation and Workers Number of Large Medium Manufacturing Industry significantly effect on RAR. Partially the level of GRDP has a significant and positive impact on RAR. Inflation does not significantly affect the revenues (RAR) and Workers Number of Large Medium Manufacturing Industry had a significant and negative effect on RAR. While the GRDP of the partial correlation value to RAR of 0.556 indicates that the variable relationship is quite strong and positive with partial determination coefficient of 0.3091, which means that the RAR is able to be explained by the GRDP amounted to 30.91 percent. Partial correlation value of inflation and RAR of -0.213 indicates that the relationship of these variables is very weak and negative with partial determination coefficient of 0.0454, which means that the RAR is only able to be explained by the variable inflation of 4.54 percent. While the partial correlation value of workers number of large medium manufacturing industry variable with RAR of -0.405 indicates that the relationship of this variable is less strong and negative with partial determination coefficient of 0.1640, which means that the RAR is able to be explained by a variable of workers number of large medium manufacturing industry was at 16,40 percent. The most dominant influence of independent variable on RAR is GRDP variable, since this variable has a value of standardized regression coefficient that is the greatest in the amount of 0.766 compared with the value of other two standardized regression coefficients variables.*

**Keywords:** RAR, GRDP, Inflation, Workers Number of Large Medium Manufactures

UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI: MAGISTER MANAJEMEN

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Pengaruh Tingkat PDRB, Inflasi dan Tenaga Kerja Industri Besar Sedang Terhadap PAD di Eks Karesidenan Pati (Kabupaten Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara)** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, .....  
Yang Menyatakan

(Agus Slamet Rupingi)  
NIM 500581394

**UNIVERSITAS TERBUKA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**MAGISTER MANAJEMEN KEUANGAN**  
 Jl. Raya Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418  
 Telp. 021-7415050 Faximile 021-7415588

**LEMBAR LAYAK UJI**

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya selaku Pembimbing TAPM dari Mahasiswa:

Nama : Agus Slamet Rupingi  
 NIM : 500 581 394  
 Judul TAPM : Pengaruh Tingkat PDRB, Inflasi dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang Terhadap PAD di Eks Karesidenan Pati (Kabupaten Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah selesai sekitar ..... persen sehingga dinyatakan sudah layak uji dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Pembimbing II

Semarang, ... Juli 2016  
 Pembimbing I

Dr. Ginta Ginting, M.B.A  
 NIP. 19600818 198603 2 002

Prof. Dr. Abdul Rohman, S.E, M.Si, Akt  
 NIP. 19660108 199202 1 001

UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI : MAGISTER MANAJEMEN

PENGESAHAN

Nama : Agus Slamet Rupingi  
NIM : 500581394  
Program Studi : Magister Manajemen  
Judul Tesis : Pengaruh Tingkat PDRB, Inflasi dan Tenaga Kerja Industri Besar  
Sedang Terhadap PAD di Eks Karesidenan Pati (Kabupaten  
Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara)

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Magister Manajemen, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 September 2016  
W a k t u : 08.00 s.d 10.00 WIB

dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji: Nama Lengkap : Dr. Tita Rosita, M. Pd  
Tandatangan

Penguji Ahli : Nama Lengkap: Dr. Ir. Mahyus Ekananda Sitompul, MM.,  
MSE  
Tandatangan

Pembimbing I : Nama Lengkap : Prof. Dr. Abdu Rohman, M.Si. Akt.  
Tandatangan

Pembimbing II : Nama Lengkap : DR. Ginta Ginting, M.B.A  
Tandatangan

## LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Pengaruh Tingkat PDRB, Inflasi dan Tenaga Kerja Industri  
 Besar Sedang Terhadap PAD di Eks Karesidenan Pati  
 (Kabupaten Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara)

Penyusun TAPM : Agus Slamet Rupingi  
 NIM : 500581394  
 Program Studi : Magister Manajemen  
 Hari/Tanggal :

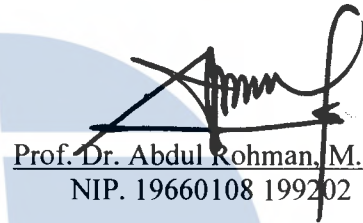
Menyetujui :

Pembimbing II,

Pembimbing I,



DR. Ginta Ginting, M.B.A  
 NIP. 19600818 198603 2 002



Prof. Dr. Abdul Rohman, M.Si. Akt.  
 NIP. 19660108 199202 1 001

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Ketua Bidang Ilmu Ekonomi dan  
 Manajemen



Suciati, M.Sc. Ph.D.  
 NIP. 19520213 198503 2 001



Mohamad Nasoha, SE., MSc.  
 NIP. 19781111 200501 1 001



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Ibu Suciati, M.Sc. Ph.D
2. Kepala UPBJJ-UT Semarang Bapak Drs. Jamaludin, M.Si selaku penyelenggara Program Pascasarjana
3. Pembimbing I ( Bapak Prof. Dr. Abdul Rohman, M.Si. Akt.) dan Pembimbing II ( DR. Ginta Ginting, M.B.A) yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini.
4. Ketua Bidang Program Magister Manajemen Bapak Mohamad Nasoha, SE., MSc. selaku penanggung jawab Program Studi Magister Manajemen
5. Bapak Kepala BPS-RI, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah dan Bapak Kepala BPS Kabupaten Pati yang telah mengizinkan saya untuk melakukan izin belajar.



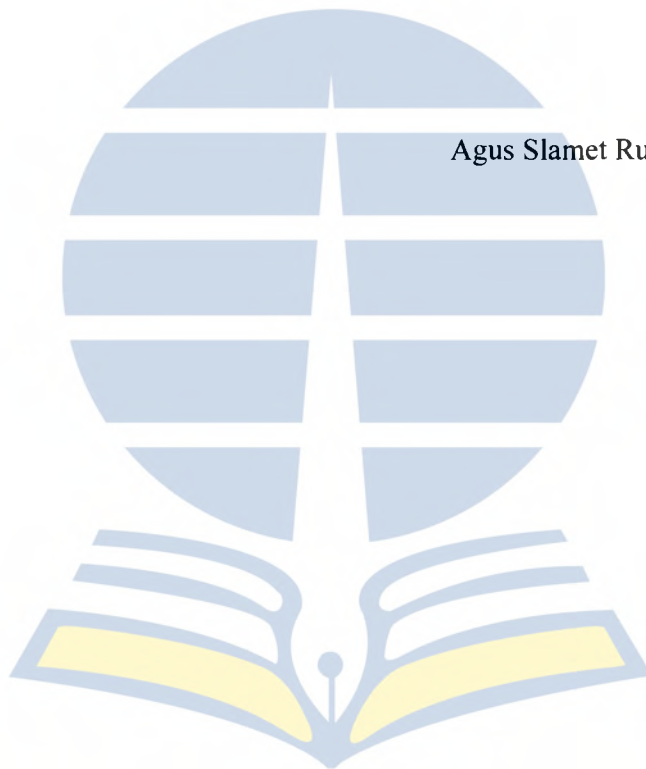
6. Ibu, isteri dan anak-anakku yang telah memberikan bantuan dan dukungan materiil dan moril
7. Teman-teman Mahasiswa yang telah banyak membantu baik dalam perkuliahan dan penulisan TAPM ini sehingga perkuliahan bisa berjalan dengan lancar.

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi semua pihak.

Pati, Juni 2016

Penulis

Agus Slamet Rupingi



**UNIVERSITAS TERBUKA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**MAGISTER MANAJEMEN KEUANGAN**  
 Jl. Raya Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418  
 Telp. 021-7415050 Faximile 021-7415588

**RIWAYAT HIDUP**

Nama / NIM : Agus Slamet Rupingi / 500 581 394

Tempat, Tgl. Lahir : Pati, 16 Agustus 1972

Registrasi Pertama : 2014.2

Alamat : Ds. Bulungan Rt 04/Rw 01 Kec. Tayu Kab. Pati

Telephon/HP : 08174167212

Riwayat Pendidikan : -. Lulus SD di SDN Mulyoharjo 1 Kec. Pati pada tahun 1985

-. Lulus SLTP di SMP Negeri 4 Pati pada tahun 1988

-. Lulus SLTA di SMA N 1 Pati pada tahun 1991

- Lulus D3 di AIS Jakarta pada tahun 1996

-. Lulus S1 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya pada tahun 2001

Riwayat pekerjaan : -. Tahun 1996 s/d 1999 sebagai staf di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang

-. Tahun 1999 s/d 2001 sebagai Mahasiswa Tugas Belajar di ITS Surabaya

-. Tahun 2002 s/d 2007 sebagai staf di BPS Kabupaten Pati

-. Tahun 2008 s/d 2013 sebagai Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) di BPS Kabupaten Rembang

-. Tahun 2014 s/d sekarang sebagai Kasi IPDS di BPS Kabupaten Pati

Semarang, ... Juli 2016  
 Hormat saya,

Agus Slamet Rupingi  
 NIM. 500 581 394

## DAFTAR ISI

		Halaman
Abstrak.....		ii
Kata Pengantar.....		viii
Daftar Isi.....		xi
Daftar Tabel.....		xiii
Daftar Gambar.....		xiv
Daftar Lampiran.....		xv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	A.Latar Belakang Masalah.....	1
	B.Perumusan Masalah.....	13
	C.Tujuan Penelitian.....	13
	D.Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
	A.Landasan Teori.....	15
	B.Definisi Konsepsional.....	27
	C.Penelitian Terdahulu.....	45
	D.Kerangka Pemikiran.....	49
	E.Hipotesis.....	52
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
	A.Desain Penelitian.....	55
	B.Populasi dan Sampel.....	55
	C.Instrumen Penelitian.....	57
	D.Sumber Data.....	58
	E. Metode Pengumpulan Data.....	58
	F.Definisi Operasional Variabel.....	59

	G. Metode Analisis Data .....	59
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	78
	A. Analisis Deskriptif.....	78
	B. Analisis Regresi.....	80
	C. Pembahasan.....	99
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	102
	A. Kesimpulan.....	102
	B. Keterbatasan.....	103
	C. Saran.....	104
	DAFTAR PUSTAKA.....	105
	LAMPIRAN.....	107

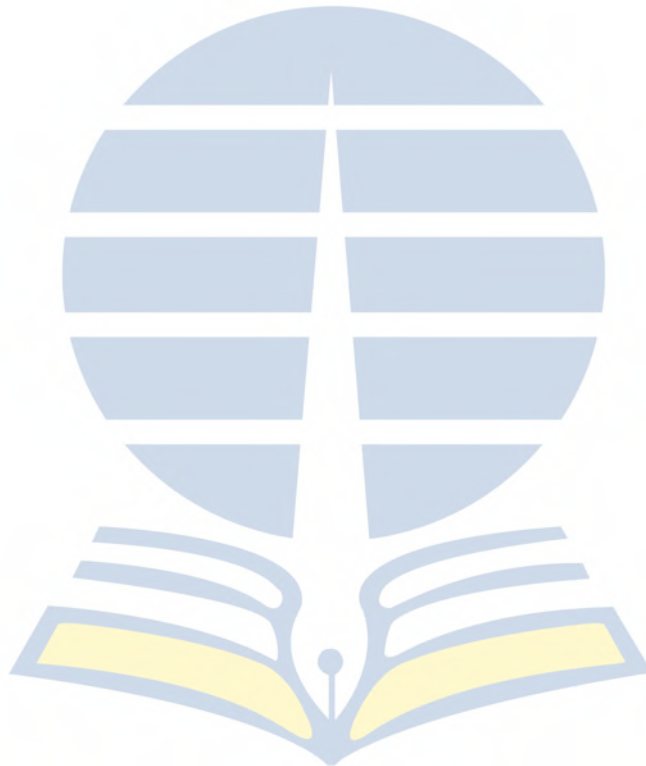


## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Besarnya PAD di Eks Karesidenan Pati Tahun 2002- 2013 (ribuan Rp).....	3
Tabel 1.2	Besarnya PDRB di Eks Karesidenan Pati Tahun 2002- 2013 (jutaan Rp).....	5
Tabel 1.3	Tingkat Inflasi di Eks Karesidenan Pati Tahun 2002- 2013 (persen).....	7
Tabel 1.4	Jumlah Tenaga Kerja IBS di Eks Karesidenan Pati Tahun 2002- 2013 (jiwa).....	8
Tabel 1.5	Distribusi PDRB di Eks Karesidenan Pati Tahun 2013	10
Tabel 3.1	Populasi dan Sampel Penelitian	56
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif Hasil Output SPSS.....	78
Tabel 4.2	Uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov.....	83
Tabel 4.3	Ringkasan Regresi Awal Hasil Output SPSS.....	84
Tabel 4.4	Output uji Glejser.....	86
Tabel 4.5	Hasil perhitungan <i>Variance Inflation Factor (VIF)</i> .....	87
Tabel 4.6	Output uji Durbin-watson.....	88
Tabel 4.7	Tabel uji Durbin Watson dengan $\alpha=5\%$ .....	89
Tabel 4.8	Hasil uji Autokorelasi <i>Run Test</i> .....	90
Tabel 4.9	Koefisien Rho yang Dipeoleh dari Outpu SPSS.....	91
Tabel 4.10	Uji Autokorelasi dengan runs tes.....	92
Tabel 4.11	Analisis Varian Model Regresi Cochran Orcutt.....	94
Tabel 4.12	Uji Parsial Model Regresi Cochran-Orcutt.....	95
Tabel 4.13	Ringkasan Hasil Uji Hipotesis.....	98

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	51
Gambar 3.1 Jarak vertikal $D$ pada grafik Kolmogorov–Smirnov test.....	66
Gambar 3.2 Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson.....	71
Gambar 4.1 Normal Probability Plot.....	80
Gambar 4.2 Grafik histogram data observasi dengan distribusi normal.....	81
Gambar 4.3 Kecondongan suatu kurva distribusi.....	82
Gambar 4.4 Scatterplot antara nilai prediksi dengan residual yang.....	85
Gambar 4.5 Grafik penolakan uji durbin-watson.....	90



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1 Uji Normalitas Data.....	107
Lampiran 2 Uji Non Parametrik Kolmogorov-Smirnov.....	108
Lampiran 3 Model Awal Regresi.....	109
Lampiran 4 Uji Heteroskedastisitas.....	111
Lampiran 5 Uji Runs Autokorelasi.....	112
Lampiran 6 Regresi Cochran-Orcutt.....	113
Lampiran 7 Runs test Cochran-Orcutt.....	116





**DAFTAR SINGKATAN**

<b>APBD</b>	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
<b>APBN</b>	: Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
<b>BPS</b>	: Badan Pusat Statistik
<b>BUMD</b>	: Badan Usaha Milik Daerah
<b>D-W</b>	: Durbin-Watson
<b>IBS</b>	: Industri Besar Sedang
<b>IHK</b>	: Indeks Harga Konsumen
<b>MSE</b>	: <i>Mean Square Error</i>
<b>NTB</b>	: Nusa Tenggara Barat
<b>PDRB</b>	: Produk Domestik Regional Bruto
<b>PHK</b>	: Pemutusan Hubungan Kerja
<b>SPSS</b>	: <i>Statistical Package for the Social Sciences</i>
<b>STIS</b>	: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
<b>Tabel I-O</b>	: Tabel Input-Output
<b>UMR</b>	: Upah Minimum Regional
<b>UU</b>	: Undang-undang
<b>UUD</b>	: Undang-undang Dasar

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea 4 (empat) dibentuknya suatu pemerintahan Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mengemban amanat tersebut, pemerintah mempunyai kebijakan di bidang fiskal yang diharapkan bisa menggerakkan atau mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi baik mikro maupun makro.

Kegiatan ini tampak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau budget pemerintah untuk tingkat pusat, sedangkan untuk tingkat daerah atau kabupaten / kota berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mulai tahun 2006, variabel APBD meliputi : Pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan, Lain-lain pendapatan yang sah; sedangkan Belanja, meliputi Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Tersangka; serta Pembiayaan-pembiayaan lainnya.

Setelah terjadi reformasi sistem pemerintahan, dari Orde Baru ke Orde Reformasi, maka **kewenangan pemerintah daerah lebih luas** dalam mengambil suatu keputusan dan kebijakan. Hal ini didukung dengan adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 jo Undang-undang No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat pentingnya APBD bagi suatu daerah untuk melaksanakan pembangunan dan keberlangsungan pemerintahan daerah, maka seharusnya lebih fokus pada pengelolaan sumber pendapatan sehingga tidak terjadi defisit anggaran yang sangat besar. Dengan demikian Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan berbagai usaha guna melayani kepentingan masyarakat dan menjalankan program-program pembangunan yang sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat memperoleh dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah Daerah. Menurut UU No.23 Tahun 2014 sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Dana Perimbangan.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah Daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah perlu meneliti adakah penerimaan yang tidak disetorkan ke dalam kas Pemerintah Daerah dan disalahgunakan oleh petugas di lapangan. Perlu juga diteliti masyarakat yang tidak membayar pajak dan pemberian sanksi atas tindakan penggelapan pajak (Mardiasmo, 2002).

Aspek utama manajemen Pemerintah Daerah yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah manajemen PAD dan manajemen dana perimbangan.



Manajemen dana pinjaman sekalipun juga penting untuk dikaji, tetapi untuk saat ini fokus perhatian hendaknya lebih diarahkan pada manajemen PAD dan manajemen dana perimbangan. Manajemen PAD terkait dengan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, sedangkan terhadap kebutuhan fiskal daerah perlu dilakukan manajemen pengeluaran daerah secara komprehensif, salah satu caranya adalah dengan membuat standar biaya misalnya Standar Analisa Belanja (Sumarni,2012).

Dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak masalah yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan penerimaan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari Pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*). Adapun besaran PAD di eks Karesidenan Pati antara tahun 2002-2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.  
Besarnya PAD di Eks Karesidenan Pati Tahun 2002-2013 (Ribuan Rp)

Tahun	Blora	Rembang	Pati	Kudus	Jepara
2002	26185726	15677504	34573274	30198793	45036658
2003	28388614	18295455	40826750	33842598	53870051
2004	30361171	18715702	55030349	42727760	47883517
2005	24835589	28534025	57150613	39968702	50761967
2006	36637785	39998292	66197687	51247705	54111307
2007	43392417	42249359	78965732	52726631	54110690
2008	48954141	51125558	80677766	56440909	70427233
2009	49699411	58887895	90396848	73709952	71948111
2010	47071084	65699259	112526537	94032693	84713358
2011	67022631	73931946	134476562	102621949	103683329
2012	81987007	102727487	163733666	113622250	129076570
2013	95186717	126808084	169127416	144995092	133778055

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, BPS

Dari tabel 1.1. dapat dijelaskan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten di eks Karesidenan Pati yang terbesar adalah dari Kabupaten Pati sementara yang paling kecil adalah Kabupaten Blora. Ini sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk dan banyaknya kegiatan ekonomi, dimana untuk Kabupaten Pati, Kudus dan Rembang merupakan jalur utama transportasi di Pulau Jawa yaitu jalur pantura yang sering dilalui kendaraan umum baik angkutan penumpang maupun barang sehingga bisa memacu sumber penerimaan PAD melalui retribusi dan perpajakan dan untuk di Kabupaten Pati banyak sumber daya alam yang bisa di tambang dalam kelompok galian C. Sementara di Kabupaten Jepara dipengaruhi oleh banyaknya industri terutama kerajinan ukir dan membuat kerajinan dari kayu lainnya. Sedangkan menurut kondisi geografis maka dapat dikelompokkan kedalam dua kondisi geografis yaitu daerah yang mempunyai perbatasan langsung dengan laut (daerah pantai) yaitu Kabupaten Rembang, Pati dan Jepara. Sedangkan dua kabupaten yaitu Kabupaten Blora dan Kudus tidak mempunyai wilayah yang berbatasan dengan laut. Tentunya ini juga berpengaruh terhadap penerimaan retribusi dan pajak daerah dari adanya kegiatan perikanan tangkap di laut tersebut.

Apabila dihitung rata-rata sumbangan PAD terhadap Penerimaan APBD dalam periode waktu Tahun 2002-2013 yang terbesar adalah Kabupaten Kudus sebesar 10,84 persen, berikutnya Kabupaten Pati sebesar 10,53 persen, Kabupaten Jepara 10,31 persen, Kabupaten Rembang 8,70 persen dan Kabupaten Blora 7,05 persen. Dengan perbandingan seperti diatas maka sumber PAD dirasakan masih kurang, karena belum bisa mencerminkan kemandirian keuangan daerah dan masih besarnya ketergantungan pada dana transfer yang diberikan oleh



pemerintah pusat atau provinsi, sehingga kedepannya harus ditingkatkan rasio derajat desentralisasi fiskal tersebut melalui peraturan daerah yang ada sehingga pemasukan PAD dalam keuangan daerah lebih ditingkatkan.

Tabel 1.2.  
Besarnya PDRB di Eks Karesidenan Pati Tahun 2002-2013 (Juta Rp)

Tahun	Blora	Rembang	Pati	Kudus	Jepara
2002	1811703	2012632	3145873	12571672	3655056
2003	2002872	2237184	3398763	14287181	4010482
2004	2253858	2425019	4648350	16465678	4383716
2005	2555232	2770983	5200372	19784423	5018164
2006	2873718	3214594	6033083	21562981	5677317
2007	3145489	3606468	6717816	24013311	6468910
2008	3636796	4064238	7705219	27224830	7455878
2009	3993824	4453568	8386572	28892300	8186322
2010	10149080	8373547	9385511	52933496	13347321
2011	11373376	9352791	10456355	56936183	14827689
2012	12285563	10323374	11534383	63448330	16381419
2013	13543662	11521067	12882090	71075155	18033855

Sumber : Kabupaten Dalam Angka, BPS

Sedangkan dari tabel 1.2. maka dapat diketahui bahwa setiap tahun terjadi pertumbuhan ekonomi di eks Karesidenan Pati selalu tumbuh positif. Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa pertumbuhan PDRB selalu meningkat dari tahun ke tahun dan merupakan potensi yang menguntungkan bagi Pemerintah Daerah masing-masing kabupaten untuk dapat menaikkan PAD. Simanjutak dan Halim (2001), juga mengemukakan jika suatu daerah dapat mengelola sumber daya alam yang dimiliki dan perekonomiannya berkembang dengan baik maka PDRB per kapita akan meningkat yang memperkuat PAD suatu daerah.

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Dalam rentang tahun 2002-2013 inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005 karena adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang berpengaruh

terhadap semua aspek perekonomian sehingga terjadi lonjakan harga yang cukup tinggi. Inflasi menimbulkan beberapa efek buruk pada perekonomian salah satunya mengurangi pendapatan riil (Sukirno, 2004). Tetapi dengan adanya inflasi maka upah juga akan mengalami kenaikan, dimana salah satu komponen dalam penghitungan Upah Minimum adalah inflasi. Penelitian Simanjutak dan Halim (2001) mengemukakan bahwa inflasi akan meningkatkan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak restoran. Hal ini karena jika inflasi melambat, pengusaha akan cenderung menaikkan sedikit harga tetapi upah yang dibayarkan akan tetap. Hal lain yang bisa dihubungkan dengan tingkat inflasi adalah pertumbuhan ekonomi, yaitu pada saat inflasi yang tinggi maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang melambat sedangkan pada saat inflasi rendah maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang besar. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi ini akan berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan PAD karena kegiatan ekonomi dalam masyarakat akan meningkatkan pendapatan sehingga pengeluaran konsumsi juga akan meningkat yang akan berakibat pada penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain pendapatan daerah akan turut terpacu.

Berbeda dengan tingkat inflasi di tahun 2005, inflasi di tahun 2008 dipicu oleh kenaikan harga komoditi dunia terutama minyak dan pangan. Kondisi krisis global tersebut dipengaruhi antara lain karena kondisi nilai tukar rupiah yang melonjak. Lonjakan harga tersebut berdampak pada kenaikan harga barang yang ditentukan pemerintah (*administered prices*) seiring dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.



Tabel 1.3.  
Tingkat Inflasi di Eks Karesidenan Pati Tahun 2002-2013 (%)

Tahun	Blora	Rembang	Pati	Kudus	Jepara
2002	9.98	10.23	10.20	9.68	9.16
2003	3.74	5.25	5.48	5.20	5.74
2004	5.70	5.53	4.98	6.11	5.53
2005	17.77	16.18	15.46	17.73	16.29
2006	5.92	5.97	5.18	6.18	7.21
2007	5.67	6.64	6.16	6.79	6.18
2008	12.79	10.50	9.34	11.99	12.12
2009	2.91	3.09	2.59	3.00	2.83
2010	7.17	6.81	6.21	7.65	6.07
2011	2.26	2.73	2.28	3.34	3.59
2012	3.89	4.28	3.85	4.77	4.43
2013	7.94	6.88	3.92	8.31	7.73

Sumber : Kabupaten Dalam Angka, BPS

Industri Besar Sedang dalam penelitian ini adalah industri yang mempunyai jumlah tenaga kerja minimal 20 tenaga kerja. Penggolongan perusahaan industri pengolahan ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu. Bila dilihat dari tabel 1.4 maka Kabupaten Kudus yang paling banyak jumlah tenaga kerjanya, kemudian diikuti Kabupaten Jepara, Pati, Rembang dan Blora dengan pola yang sama dalam setiap tahunnya. Kabupaten Kudus dengan mendapat julukan kota kretek mempunyai industri rokok dengan penyerapan tenaga kerja yang sangat banyak, sedangkan Kabupaten Jepara dengan julukan kota ukir yang mempunyai industri pengolahan kayu juga menyerap tenaga kerja yang besar. Tetapi bila dilihat dari jumlah industri besar sedang maka Kabupaten Jepara paling banyak industrinya. Hal ini terjadi karena industri rokok di Kabupaten

Kudus walaupun jumlahnya lebih sedikit, tetapi masing-masing pabrik rokok mempunyai tenaga kerja yang ribuan orang.

Tabel 1.4.  
Jumlah Tenaga Kerja IBS di Eks Karesidenan Pati Tahun 2002-2013 (orang)

Tahun	Blora	Rembang	Pati	Kudus	Jepara
2002	2335	3858	16954	69686	23282
2003	1986	3067	16193	71416	21372
2004	2191	8476	15949	66293	21083
2005	2540	3260	16764	75258	21787
2006	2993	7598	19960	89581	40184
2007	2878	7486	19271	89794	32154
2008	2761	7323	18968	100526	28853
2009	2197	7471	17235	96556	28797
2010	2154	5787	24693	96468	69412
2011	1786	5911	25502	96113	46798
2012	1762	4407	29774	100841	33758
2013	1781	4797	29578	146045	30562

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, BPS

Banyaknya tenaga kerja tentunya berpengaruh terhadap pendapatan para pekerja yang kemudian akan mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat dan menjadikan perekonomian menjadi lebih cepat tumbuh. Dengan naiknya daya beli maka masyarakat akan secara tidak langsung berpengaruh terhadap penerimaan PAD disitu akan muncul banyak aktivitas ekonomi misalnya perdagangan/warung baru yang membuat mereka mempunyai kewajiban membayar retribusi sehingga penerimaan PAD akan bertambah lebih besar. Selain hal tersebut, jumlah industri juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah yang tentunya akan berdampak langsung terhadap penerimaan PAD.

Langkah penting yang harus dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD yang riil



dimiliki daerah. Untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional.

Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebenarnya tidak hanya menyangkut peningkatan PAD. Peningkatan kapasitas fiskal daerah pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan secara optimal dan yang perlu dipahami bahwa peningkatan kapasitas fiskal bukan berarti anggaran yang besar jumlahnya, yang penting adalah optimalisasi anggaran karena peran Pemerintah Daerah nantinya lebih bersifat fasilitator dan motivator dalam menggerakkan pembangunan di daerah. Masyarakat daerah sendiri yang akan banyak berperan membangun daerahnya sesuai dengan kepentingan dan prioritas mereka.

APDB merupakan seluruh pendapatan dan pemasukan Pemerintah Daerah, yang digunakan untuk belanja dan pembiayaan-pembiayaan. Sehingga untuk meningkatkan kemandirian daerah dan melaksanakan manajemen anggaran yang baik, maka dicari faktor apa saja yang dapat dipakai untuk memperkirakan peningkatan/penurunan pendapatan asli daerah diluar komponen APBD dan dapat digunakan untuk alat perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengendalian anggaran sesuai prinsip manajemen yang dapat dipakai oleh pemegang kekuasaan di tingkat daerah.

Di Eks Karesidenan Pati apabila dilihat dari perkembangan sektor perekonomiannya yang dilihat berdasar distribusi PDRB menurut sektor yang dominan (Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan dan sektor lainnya) pada tahun 2013 maka dapat diketahui bahwa sektor Industri Pengolahan mempunyai

andil yang cukup berperan. Terutama Kabupaten Kudus, Jepara dan Pati merupakan sektor yang memberikan andil yang terbesar diantara sektor ekonomi yang lainnya, sedangkan Kabupaten Rembang dan Blora sektor Pertanian masih sangat dominan. Sehingga kedua sektor tersebut masih merupakan andalan untuk kabupaten di Eks Karesidenan Pati.

Tabel 1.5.  
Distribusi PDRB di Eks Karesidenan Pati Tahun 2013 (persen)

Sektor	Blora	Rembang	Pati	Kudus	Jepara
<b>Pertanian</b>	29,93	33,39	24,47	2,39	16,22
<b>Industri Pengolahan</b>	10,27	18,83	27,11	81,76	33,21
<b>Perdagangan</b>	16,88	13,44	14,25	5,35	17,71
<b>Lainnya</b>	42,92	34,34	34,17	10,50	32,86
<b>Total</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kabupaten Dalam Angka, BPS

(Triani dan Yeni, 2010), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 di Kabupaten Karanganyar dengan variabel penelitiannya adalah variabel dependen : Pendapatan Asli daerah (PAD) sedangkan variabel bebasnya adalah PDRB, Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar.
2. Variabel jumlah penduduk secara statistik signifikan berpengaruh terhadap penerimaan PAD.
3. Variabel inflasi menunjukkan berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD.
4. Ketiga variabel makro (PDRB, jumlah penduduk, inflasi) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PAD.



Hasil penelitian tersebut berbeda dengan kesimpulan yang dilakukan oleh Aryanti dan Indarti (2010), dalam ASET Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.28 No.2 Oktober 2010: 133-151 dengan judul Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang dengan Variabel Dependen adalah Pendapatan Asli daerah (PAD) sedangkan variabel bebas adalah PDRB, Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel PDRB berpengaruh positif terhadap PAD.
2. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD.
3. Variabel inflasi secara statistik tidak berpengaruh terhadap penerimaan PAD.
4. Variabel PDRB, jumlah penduduk, inflasi memiliki pengaruh terhadap PAD.

Purbayu Budi Santiso dan Retno Puji Rahayu, dalam jurnal Dinamika Pembangunan, Vol.2 No. 1 Juli 2005: 9-18 yang berjudul Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri dengan menggunakan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah dan variabel bebas yang berupa Total Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan PDRB diperoleh kesimpulan bahwa secara bersama-sama variabel pengeluaran pembangunan, penduduk, dan PDRB mampu menerangkan dengan variabel dependennya yaitu variabel PAD. Dari ketiga variabel tersebut yang mempunyai pengaruh paling besar yaitu variabel jumlah penduduk

Muchtholifah, dalam jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No.1 Januari 2010, dengan judul Pengaruh PDRB, Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto dengan menggunakan variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan variabel independen PDRB,

Inflasi, Investasi Industri, Jumlah Tenaga Kerja didapat suatu hasil analisis yaitu secara simultan bahwa PDRB, Inflasi, investasi industri, dan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto. Variabel yang paling berpengaruh terhadap PAD adalah variabel PDRB, karena variabel ini memiliki koefisien determinasi paling besar dari nilai ketiga variabel lain.

Tetapi hasil yang berbeda juga dilakukan oleh Hidayatullah A. Taufiq, 2011 dalam skripsi yang berjudul Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB Tahun 2005-2008, dengan menggunakan variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah dan variabel independen : PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi menghasilkan kesimpulan bahwa PDRB tidak mempengaruhi PAD secara signifikan, sedangkan jumlah penduduk mempengaruhi PAD secara signifikan positif dan inflasi mempengaruhi PAD secara signifikan negatif. Secara bersama-sama PDRB, Jumlah Penduduk dan Inflasi berpengaruh terhadap PAD.

Berdasarkan uraian diatas tentang adanya *research gap* antara penelitian yang dilakukan oleh Triani dan Yeni (2010) dengan Aryanti dan Indarti (2010), Purbayu dan Rahayu (2005) serta Muchtholifah (2010) dengan Taufiq (2011) maka perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memperjelas pengaruh tingkat PDRB dan inflasi terhadap PAD. Selain itu penulis ingin mengetahui faktor-faktor diluar komponen APBD yang dapat dipakai untuk memperkirakan peningkatan/penurunan PAD dan dapat digunakan untuk alat perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengendalian anggaran sesuai prinsip manajemen yang dapat dipakai oleh pemegang kekuasaan di tingkat daerah. Adapun



faktor-faktor tersebut yang akan dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut :  
Bagaimana pengaruh tingkat PDRB, inflasi dan jumlah tenaga kerja sektor industri besar dan sedang terhadap PAD kabupaten-kabupaten di eks Karesidenan Pati.

#### **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian pada latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
4. Apakah Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Inflasi, dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang secara serempak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang terhadap Pendapatan Asli Daerah



4. Untuk mengetahui pengaruh secara serempak Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Inflasi, dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Akademis :

1. Sebagai bahan referensi dan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis serta sumbangan pemikiran tentang pembangunan ekonomi daerah

Manfaat praktis :

2. Sebagai indikator dini untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penerimaan PAD dengan cara melihat indikasi dari variabel diluar APBD yaitu PDRB, inflasi dan jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang.
3. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten di eks Karesidenan Pati terutama yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dalam merencanakan/mengestimasi PAD dengan mempertimbangkan variabel independen yang berpengaruh terhadap PAD, melalui tingkat PDRB, inflasi dan jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A, Landasan Teori

##### 1. Teori Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Ini tidak berarti bahwa harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi (Boediono, 1993). Samuelson dan Nordhaus dalam buku mereka *Macro Economics* mendefinisikan inflasi dengan cukup pendek yaitu kenaikan tingkat harga umum. Adapun Bank Indonesia mendefinisikan inflasi dengan kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus.

Menurut Yusup Saputra Eman (2015) secara garis besar ada 3 kelompok teori mengenai inflasi, masing-masing menyoroiti aspek-aspek tertentu, yaitu:

##### a. Teori Kuantitas

Teori ini menyoroiti peranan dalam proses inflasi dari:

- Jumlah uang yang beredar
- Psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga.

Inti dari teori ini adalah :

- Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar (berupa penambahan uang kartal atau penambahan uang giral).

- Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut maka ada 3 kemungkinan keadaan yang akan terjadi yang berhubungan dengan inflasi yaitu :

- (1). Keadaan pertama, apabila masyarakat tidak (atau belum) mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan bulan mendatang. Ini berarti sebagian besar dari kenaikan jumlah uang tersebut tidak dibelanjakan untuk pembelian barang. Sehingga tidak akan ada kenaikan permintaan yang berarti akan barang-barang, jadi tidak ada kenaikan harga barang-barang. Dalam keadaan seperti ini kenaikan jumlah uang beredar sebesar 10% diikuti oleh kenaikan harga-harga sebesar misalnya 1%. Keadaan ini biasa dijumpai pada waktu inflasi masih baru mulai dan masyarakat masih belum sadar bahwa inflasi sedang berlangsung.
- (2). Keadaan kedua adalah di mana masyarakat atas dasar pengalaman di bulan bulan sebelumnya mulai sadar adanya inflasi. Penambahan jumlah uang yang beredar digunakan oleh masyarakat untuk membeli barang-barang (memperbesar pos aktiva barang-barang didalam neraca). Kenaikan harga (inflasi) adalah suatu pajak atas saldo kas masyarakat, karena uang semakin tidak berharga. Dan orang-orang berusaha menghindari pajak ini dengan mengubah saldo kasnya menjadi barang. Sehingga permintaan akan barang-barang melonjak, akibatnya harga barang-barang tersebut juga mengalami kenaikan. Pada keadaan ini kenaikan jumlah uang sebesar,



misalnya 10% akan diikuti dengan kenaikan harga barang mungkin sebesar 10% pula.

- (3). Keadaan ketiga adalah tahap hiperinflasi, yakni orang-orang sudah kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang. Keadaan ini ditandai oleh makin cepatnya peredaran uang (*velocity of circulation* yang menaik). Uang yang beredar sebesar misalnya 20% akan mengakibatkan kenaikan harga lebih besar dari 20%.

#### b. Teori Keynes

Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini adalah proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat. Proses perebutan ini diterjemahkan menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (timbulnya *inflationary gap*).

#### c. Teori Strukturalis

Adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran (*rigidities*) dari struktur perekonomian yang sedang berkembang. Karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian (faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang) maka teori ini disebut juga teori inflasi jangka panjang.

Menurut teori ini ketegaran utama ada dua macam:

- (1). Ketegaran yang pertama berupa ketidakelestarian dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lambat dibanding dengan pertumbuhan sektor- sektor lain.

Kelambanan ini disebabkan oleh:

- Harga di pasar dunia dari barang-barang ekspor negara tersebut makin tidak menguntungkan dibanding dengan barang-barang impor yang harus dibayar (*term of trade* makin memburuk).
- *Supply* atau produksi barang-barang ekspor yang tidak responsif terhadap kenaikan harga (*supply* barang-barang ekspor yang tidak elastis).

Kelambanan pertumbuhan penerimaan ekspor ini, berarti kelambanan pertumbuhan kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan (untuk konsumsi maupun investasi). Akibatnya negara tersebut mengambil kebijaksanaan pembangunan yang menekankan pada penggalakan produksi dalam negeri dari barang-barang yang sebelumnya diimpor (*import substitution strategy*), meskipun biaya produksi dalam negeri lebih tinggi dan berkualitas rendah daripada barang- barang sejenis yang diimpor. Biaya yang lebih tinggi ini mengakibatkan harga yang lebih tinggi pula. Bila proses substitusi impor ini makin meluas, biaya produksi juga meluas ke berbagai barang, sehingga makin banyak harga barang yang naik, dan inflasipun terjadi.

- (2). Ketegaran kedua berkaitan dengan ketidakelestarian dari *supply* atau produksi bahan makanan di dalam negeri. Produksi bahan makanan dalam negeri tidak tumbuh secepat pertambahan penduduk dan penghasilan per kapita, sehingga harga bahan makanan di dalam negeri cenderung untuk menaik melebihi

kenaikan harga barang-barang lain. Akibat selanjutnya adalah timbulnya tuntutan karyawan untuk memperoleh kenaikan upah. Kenaikan upah berarti kenaikan ongkos produksi, yang berarti kenaikan harga barang-barang tersebut. Kenaikan harga tersebut menyebabkan tuntutan kenaikan upah lagi. Dan kenaikan upah ini diikuti kenaikan harga-harga. Demikian seterusnya.

Kesimpulan dari teori strukturalis yaitu:

- (1). Teori ini menerangkan proses inflasi jangka panjang di negara-negara yang sedang berkembang.
- (2). Jumlah uang yang beredar bertambah secara pasif mengikuti dan menampung kenaikan harga barang-barang tersebut. Proses inflasi tersebut dapat berlangsung terus hanya bila jumlah uang yang beredar juga bertambah terus. Tanpa kenaikan jumlah uang, proses tersebut akan berhenti dengan sendirinya (juga dalam teori Keynes dan teori kuantitas).
- (3). Tidak jarang faktor-faktor struktural yang dikatakan sebagai sebab musabab yang paling dasar dari proses inflasi tersebut bukan 100% struktural. Sering dijumpai bahwa ketegaran-ketegaran tersebut disebabkan oleh kebijaksanaan harga/moneter pemerintah sendiri.

## 2. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Kuncoro (2001) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB.



Penggunaan PDRB sebagai variabel independen yang mempengaruhi kemiskinan dikarenakan angka PDRB dapat menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dalam suatu wilayah tanpa menandang tingkat pendapatan tiap-tiap golongan, sehingga PDRB berlaku secara menyeluruh. Sementara PDRB per kapita hanya mengukur golongan pendapatan tertentu di wilayah tertentu, sehingga dalam menganalisis kemiskinan hanya terbatas pada golongan pendapatan tertentu saja.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut BPS didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan (Robinson Tarigan, 2008), yaitu:

(1). Pendekatan Produksi

Pendekatan ini menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antar masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku/penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi.

(2). Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah, gaji, dan surplus usaha, penyusutan, pajak tidak langsung neto pada sektor pemerintah dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan.



### (3). Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan ini menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok, dan ekspor neto.

Menurut BPS, cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu:

1. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya.
2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi.

Rahardjo Adisasmita (2011) berpendapat bahwa indikator yang dipergunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Alasan yang mendasari pemilihan PDRB sebagai suatu indikator mengukur pertumbuhan ekonomi adalah:

1. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah. Hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.
2. PDRB dihitung atas dasar konsep arus barang, artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Aliran konsep ini memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
3. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, data PDRB adalah data PDRB atas dasar harga konstan, artinya pertumbuhan PDRB mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan perekonomian dalam periode tertentu.

### **3. Pengertian Ketenagakerjaan**

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Undang-undang No. 13 Tahun 2003: Tentang Ketenagakerjaan).

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting disamping sumber alam, modal dan teknologi. Apabila ditinjau secara umum



pengertian tenaga kerja adalah menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa dan mempunyai nilai ekonomis yang dapat berguna bagi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja.

Tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000 Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas. Namun sejak Sensus Penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. Batas usia tersebut bisa saja berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut adalah agar definisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Di dalam pengertian tenaga kerja itu juga dimaksudkan kelompok yang sedang mencari pekerjaan, bersekolah dan mengurus rumah tangga. Meskipun mereka tidak bekerja tetapi secara fisik mereka mampu bekerja dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Inilah alasannya mengapa kelompok ini juga dimaksudkan ke dalam kelompok tenaga kerja. Dua golongan pertama yaitu penduduk yang sudah bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan disebut angkatan kerja. Sedangkan kelompok yang terakhir yaitu penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan kelompok lain-lain yang menerima pendapatan disebut bukan angkatan kerja (*Potential Labor Force*). Berdasarkan uraian diatas dapatlah kita simpulkan bahwa tenaga kerja meliputi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, sedangkan yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, para penyandang cacat, dan lanjut usia.

#### **4. Hubungan Pertumbuhan PDRB dan Pendapatan Asli Daerah**

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan kemandirian daerah, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Sidik, 2002).

Peningkatan PAD menunjukkan adanya partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerahnya. Semakin tinggi PAD maka akan menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut. Pemerintah daerah yang salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan PAD sebagai bentuk kemandirian di era otonomi daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRBnya dari tahun ke tahun.

#### **5. Hubungan Inflasi dengan Penerimaan Asli Daerah**

Terdapat perbedaan antara penganut ekonomi sisi permintaan dengan ekonomi sisi penawaran hubungan antara inflasi dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga maka jumlah barang yang dapat dibeli oleh masyarakat niscaya akan mengalami perubahan pula (Rosyidi, 1998 : 119)



Apabila inflasi meningkat masyarakat mencurahkan perhatian pada sumber daya riil dan mengurangi uang yang mereka pegang. Dalam suatu system perpajakan yang mengharuskan masyarakatnya membayar pajak lebih tinggi jika pendapatan nominal mereka meningkat secara otomatis inflasi akan meningkatkan tingkat pajak rata-rata masyarakat (Samuelson, 1994 : 317) .

Dengan semakin naiknya inflasi sistem pemungutan pajak terjadi berantakan, pemerintah sampai pada suatu keadaan yang mendorong untuk meningkatkan penerimaannya lebih besar (Dornbusch, 1993 : 605)

## 6. Teori Keynes tentang Ketenagakerjaan

Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan (*equilibrium*). Dalam posisi keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara penuh (*full-employed*). Dengan demikian di bawah sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada yang bekerja, daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Kesediaan untuk bekerja dengan tingkat upah lebih rendah ini akan menarik perusahaan untuk memperkerjakan mereka lebih banyak.

Kritikan Jhon Maynard Keynes (1883-1946) terhadap sistem klasik salah satunya adalah tentang pendapatnya yang mengatakan bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian (*adjustment*) otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik di atas. Di manapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*labor union*) yang

akan berusaha memperjuangkan kepentingan pekerja dari penurunan tingkat upah. Kalaupun tingkat upah diturunkan maka boleh jadi tingkat pendapatan masyarakat akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan akan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunnya harga-harga.

Kalau harga-harga turun, maka kurva nilai produktivitas marjinal tenaga kerja (*marginal value of productivity of labor*), yang dijadikan sebagai patokan oleh pengusaha dalam memperkerjakan tenaga kerja akan turun. Jika penurunan dalam harga-harga tidak begitu besar, maka kurva nilai produktivitasnya hanya turun sedikit. Meskipun demikian jumlah tenaga kerja yang bertambah tetap saja lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Lebih parah lagi kalau harga-harga turun drastis maka kurva nilai produktivitas marjinal dari tenaga kerja juga turun drastis dimana jumlah tenaga kerja yang tertampung menjadi semakin kecil dan pengangguran menjadi semakin bertambah luas (Mulyadi, 2003).

## **7. Hubungan Angkatan Kerja dan Pertumbuhan PDRB**

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran domestiknya lebih besar. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada



kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut.

Menurut Nicholson (1991) bahwa fungsi produksi suatu barang /jasa tertentu (q) adalah  $Q = f(K, L)$  dimana K merupakan modal dan L adalah tenaga kerja yang memperlihatkan jumlah maksimal suatu barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi.

Tambahan produksi inilah yang disebut dengan produk fisik marjinal (*Marginal Physical Product*). Apabila jumlah angkatan kerja ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan produktivitas namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan produktivitasnya.

## **B. Definisi Konseptual**

### **1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan

pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

#### a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD dan sekarang dalam usaha untuk ditingkatkan penerimaannya karena potensinya cukup besar. Pajak daerah menurut UU No.34 Tahun 2000 adalah:

“iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah”.

Pengelompokan pajak didasarkan atas sifat atau ciri tertentu pada setiap pajak, sehingga dapat dikelompokkan menjadi (Waluyo dan Ilyas, 2002):

1. Pembagian berdasarkan golongan : pajak langsung, pajak tidak langsung.
2. Pembagian berdasarkan sifatnya : pajak subyektif, pajak obyektif.
3. Pembagian berdasarkan pemungutannya : pajak pusat, pajak daerah.

Pajak daerah berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat propinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Penggolongan pajak yang diatur dalam UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2) serta Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No.34 Tahun 2000 adalah:



1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c dan pajak parkir.

#### **b. Retribusi Daerah**

Sumber PAD juga meliputi retribusi atau perizinan yang diperbolehkan dalam undang-undang. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Saragih, 2003).

Menurut UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, yang dimaksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/badan. Jadi retribusi lebih menyerupai harga dalam proses jual beli secara bebas. Akan tetapi retribusi bukan merupakan seluruh harga barang atau jasa yang dinikmati oleh pembayar retribusi sebagai pajak yang bersifat khusus. Retribusi juga harus berdasarkan peraturan daerah yang harus disetorkan pada kas negara atau daerah. Retribusi pada umumnya bersifat paksaan, tergantung apakah ia mempergunakan jasa dari daerah atau

tidak. Bila ia mempergunakan maka harus membayar retribusi berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Sumber penerimaan retribusi daerah kabupaten atau kota terdiri dari: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian cetak kartu penduduk dan akte sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi pasar, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin gangguan.

### **c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Sumber penerimaan ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatannya meliputi bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank dan bagian laba atas penyertaan modal atau investasi. Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan penerimaan yang berupa bagian laba BUMD, yang terdiri dari laba Bank Pembangunan Daerah dan bagian laba BUMD lainnya. Posisi Perusahaan Daerah atau BUMD sangat penting dan strategis sebagai salah satu institusi milik daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD. Pemerintah Daerah juga dapat melakukan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi peran BUMD yang diharapkan dapat berfungsi sebagai pemicu utama.



#### **d. Lain-lain PAD yang Sah**

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari luar pajak dan retribusi daerah atau lain-lain milik Pemerintah Daerah yang sah dan disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah. Jenis pendapatan ini meliputi hasil penjualan aset tetap daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah, serta keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (Halim, 2004).

## **2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Nilai ini masih dalam bentuk nilai kotor yang belum dikurangi dengan pajak dan lain-lain.

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu : pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

### **a Menurut Pendekatan Produksi**

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut menurut BPS dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha yaitu :

- (1). Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan,
- (2). Pertambangan dan Penggalian,
- (3). Industri Pengolahan,
- (4). Listrik, Gas, dan Air Bersih,
- (5). Konstruksi,
- (6). Perdagangan, Restoran dan Hotel,
- (7). Pengangkutan dan Komunikasi,
- (8). Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan,
- (9). Jasa-jasa termasuk Jasa Pelayanan Pemerintah.

#### **b Menurut Pendekatan Pendapatan**

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan ini persektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

#### **c Menurut Pendekatan Pengeluaran**

PDRB adalah semua komponen pengeluaran akhir seperti :

- (1). Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba,
- (2). Konsumsi pemerintah,



- (3). Pembentukan modal tetap bruto,
- (4). Perubahan stok, dan
- (5). Ekspor neto dalam jangka waktu tertentu.

Ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor. Ekspor/impor yang dimaksud adalah keluar atau masuk barang dan jasa dari wilayah ke wilayah lain (kabupaten lain) atau ke luar negeri.

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut memberikan jumlah yang sama antara jumlah pengeluaran dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya. Selanjutnya PDRB atas dasar harga pasar mencakup komponen pajak tidak langsung neto.

#### **d Metode Dasar Untuk Penghitungan PDRB Riil**

Seperti telah diketahui bahwa angka-angka pendapatan regional atas dasar harga konstan sangat penting untuk melihat pertumbuhan riil dari tahun ke tahun bagi setiap agregat ekonomi. Agregat ekonomi yang dimaksud adalah Produk Domestik Regional Bruto, nilai tambah sektoral, komponen penggunaan PDRB, dan pendapatan regional.

Pada dasarnya dikenal tiga cara penghitungan nilai tambah sektoral atas dasar harga konstan, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1) Revaluasi**

Metode ini dilakukan dengan cara menilai produksi masing-masing tahun dengan menggunakan harga tahun dasar.

## 2) Ekstrapolasi

Yang perlu diperhatikan dalam cara ini ialah penentuan ekstrapolatornya. Kuantitas produksi dari masing-masing sektor/sub sektor merupakan ekstrapolator yang terbaik. Namun apabila angka-angka tersebut tidak dapat diperoleh, maka dapat pula dipakai keterangan-keterangan lain yang erat kaitannya dengan produktivitas seperti tenaga kerja, kapasitas produksi (mesin, kendaraan, dan sebagainya). Nilai tambah atas dasar harga konstan pada suatu tahun diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar dengan indeks produksi (kuantum) sebagai ekstrapolatornya.

## 3) Deflasi

Metode ini dilakukan dengan membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku dengan indeks harga dari barang-barang yang bersangkutan. Indeks harga disini dapat berupa indeks harga perdagangan besar, indeks harga produsen dan indeks harga konsumen. Indeks harga yang dipakai sebagai deflator harus disesuaikan tahun dasarnya (2000).

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2000, ketersediaan data yang konsisten untuk mendukung penggunaan tahun dasar tersebut, yaitu tersedianya tabel I-O baik secara nasional

maupun regional. Di samping itu ketersediaan data dasar baik cakupan, harga, maupun volume tahun 2000 tersedia secara rinci pada masing-masing sektor ekonomi relatif lebih lengkap dan berkelanjutan dibandingkan pada tahun 1993. Dengan dukungan data yang lebih lengkap dan rinci serta berkesinambungan, diharapkan estimasi PDRB dengan tahun dasar 2000 dapat disusun lebih akurat dan konsisten.

Manfaat yang dapat diperoleh dari Statistik Pendapatan Regional antara lain :

- a. PDRB harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi untuk menghasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar.
- b. PDRB harga berlaku menunjukan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah.
- c. PDRB harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan setiap sektor dari tahun ke tahun.
- d. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
- e. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB persatu orang penduduk.
- f. PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita.



### 3. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum (www.bps.go.id). Pengertian inflasi menurut para ahli adalah :

- Ekonom Parkin dan Bade

Inflasi adalah pergerakan ke arah atas dari tingkatan harga. Secara mendasar ini berhubungan dengan harga, hal ini bisa juga disebut dengan berapa banyaknya uang (rupiah) untuk memperoleh barang tersebut.

- Menurut Nopirin (1987:25)

Proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus selama periode tertentu.

- Menurut Samuelson dan Nordhaus (1998: 578-603)

Inflasi dinyatakan sebagai kenaikan harga secara umum. Jadi tingkat inflasi adalah tingkat perubahan harga secara umum yang dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rate of inflation (year } t) = \frac{\text{Price (year } t) - \text{price level (year } t-1)}{\text{price level (year } t-1)}$$

Ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, Prathama dan Mandala (2001:203)

#### 1) Kenaikan harga

- Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya.



2) Bersifat umum

- Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga secara umum naik.

3) Berlangsung terus menerus

- Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadi sesaat, karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan.

### Cara Penghitungan Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk menggambarkan fluktuasi atau perubahan harga satu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Perkembangan harga komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat tersebut dihitung dengan formula statistik menjadi sebuah angka gabungan (*agregat*) yang disebut IHK. Indeks ini yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Penentuan jumlah, jenis dan kualitas dalam paket komoditi barang dan jasa serta bobot timbangannya dalam IHK didasarkan pada hasil penghitungan yang dilaksanakan oleh BPS kabupaten.

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah besaran angka yang menunjukkan perbandingan dengan tahun dasar. Yang dimaksud angka yang diperbandingkan adalah nilai konsumsi rumah tangga, sedangkan tahun dasar adalah angka nilai

konsumsi rumah tangga ( dari hasil survei ) yang menjadi patokan/dasar untuk dibandingkan dengan angka-angka selanjutnya, lazimnya angka tahun dasar dibuat 100. Bilamana angka indeks suatu periode lebih besar dari 100, dapat diartikan terjadi kenaikan harga/Inflasi, sebaliknya bilamana angka pada suatu periode lebih kecil dari 100 dapat diartikan terjadi deflasi.

Yang bertindak sebagai sumber data adalah beberapa pedagang eceran di pasar tradisional dan pasar swalayan, pasar ini dipilih sebagai sampel dengan pertimbangan bahwa pasar tersebut banyak dikunjungi konsumen, dan memenuhi syarat yang telah ditentukan, antara lain :

1. Mempunyai komoditas barang relatif banyak dan lengkap.

Harga-harga barang dan jasa di pasar tersebut merupakan panutan bagi pasar-pasar lainnya/disekitarnya (*price leader*).

2. Mempunyai tempat penjualan yang tetap.

Indeks Harga Konsumen, hitungannya didasarkan atas harga barang/jasa. Harga barang/jasa yang diperlukan harus dikumpulkan melalui survei dan dilakukan secara berkala, dari pasar-pasar di daerah kabupaten. Frekuensi pengumpulannya berbeda-beda, karena tiap-tiap komoditi mempunyai sifat yang berbeda. Ada yang diatur mingguan, ada yang bulanan dan ada yang triwulanan.

Dari komoditi yang diamati tersebut dikelompokkan menjadi 7 kelompok pengeluaran, yaitu:

1. Kelompok Bahan Makanan
2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau
3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar
4. Kelompok Sandang

5. Kelompok Kesehatan
6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga
7. Kelompok Transport dan Komunikasi

Formula penghitungan yang digunakan adalah metode *Laspeyres* yang telah dimodifikasi dan notasinya sebagai berikut :

$$IHK_n = \left( \frac{\frac{P_{n_i}}{P_{(n-1)_i}} \times P_{(n-1)_i} \cdot Q_{0_i}}{P_{0_i} \cdot Q_{0_i}} \right) \times 100$$

Keterangan :

$IHK_n$  = Indeks bulan ke-n ( bulan sasaran pengamatan )

$P_{n_i}$  = Harga jenis barang di bulan pengamatan.

$P_{(n-1)_i}$  = Harga jenis barang di bulan sebelumnya.

$P_{0_i} \cdot Q_{0_i}$  = Nilai konsumsi suatu jenis barang di tahun dasar.

$\frac{P_{n_i}}{P_{(n-1)_i}} \times 100$  = Relatif harga yang terjadi di bulan ke-n (bulan yang diamati) dibandingkan dengan bulan sebelumnya (n-1) untuk suatu jenis barang.

$P_{(n-1)_i} \cdot Q_{0_i}$  = Nilai Konsumsi bulan ke- (n-1).

$$I_n = \left( \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \right) \times 100$$

Keterangan:



$I_n$  = Inflasi pada bulan ke - n

$IHK_n$  = IHK pada bulan ke-n

$IHK_{n-1}$  = IHK pada bulan ke (n-1)

#### 4. Tenaga kerja pada industri besar dan sedang.

Dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh dunia usaha, dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu: kelompok produsen dan kelompok konsumen. Kelompok produsen menggunakan faktor produksi yang berasal dari kelompok konsumen dan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebaliknya barang dan jasa yang dihasilkan produsen dibeli oleh konsumen dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Dari kedua kelompok tersebut mempunyai peranan yang berbeda, kelompok konsumen memiliki jasa faktor produksi berupa tenaga kerja, modal dan tanah serta pengeluaran untuk konsumsi, sedangkan kelompok produsen menyediakan barang dan jasa konsumsi serta membayar uang untuk pemakaian jasa faktor-faktor produksi yaitu berupa upah / gaji, bunga dan sewa. (Mansoer, 2000 : 53-55). Transaksi dari kedua kelompok ini saling membutuhkan, kelompok produsen menyediakan barang dan jasa serta membayar upah / gaji, sewa dan bunga, sedangkan kelompok konsumen membayar barang dan jasa dan menerima upah / gaji serta sewa dan bunga dari produsen / perusahaan.

Sedangkan yang dimaksud bekerja dalam konteks ini adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan menghasilkan barang atau jasa dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam tidak terputus-putus dalam satu minggu, kegiatan tersebut termasuk pula pekerja tak dibayar yaitu pemilik atau keluarga pemilik usaha yang



membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi, yang dimasukan kriteria ini minimal berumur 15 tahun ke atas.

Data jumlah tenaga kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah khusus di sektor industri besar dan sedang yang meliputi jenis pekerjaan dan status pekerjaan. Jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh seseorang yang bekerja, meliputi tenaga : profesional, kepemimpinan, pejabat pelaksana, tata usaha, penjualan, usaha jasa, produksi/operator dan lainnya, sedangkan status pekerjaan adalah status kegiatan usaha seseorang yang sedang melakukan pekerjaan, meliputi : pekerja tetap, pekerja tidak tetap, pekerja kontrak, pekerja *outsourcing* dan pekerja keluarga.

Tenaga kerja sangat berhubungan erat dengan output hasil industri, karena tenaga kerja merupakan faktor dominan terhadap jenis produksi yang dihasilkan. Yang menjadikan pertanyaan adalah, Apakah tenaga-tenaga kerja yang terlibat dalam perusahaan industri besar dan sedang tersebut sudah mempunyai ketrampilan yang memadai atau merupakan suatu tenaga trampil sesuai apa yang diharapkan perusahaan. Apabila banyak tenaga yang trampil dalam industri kita, maka keunggulan kompetitif akan segera didapat, sehingga persaingan pasar global bisa diatasi dan selanjutnya pemerintah dapat menambah pendapatannya melalui pajak dan retribusi dari sektor industri tersebut. Harapan baik perusahaan maupun pemerintah pertumbuhan produktifitas sektor industri tinggi, sehingga keuntungan dapat diraih, jangan sampai terjadi sebaliknya yaitu tingkat produktifitas rendah, bisa menyebabkan perusahaan kalah bersaing dan akhirnya tutup.

(Hasibuan, 2007) Beberapa penelitian menunjukkan bahwa waktu yang produktif dalam bekerja berkisar 25% sampai 30%, sedangkan waktu yang tidak

produktif karena jeleknya manajemen mencapai 50% dan sisanya adanya pekerjaan yang sia-sia karena karakteristik dari jenis pekerjaannya / tidak sportif. Kesempatan utama dalam meningkatkan produktifitas manusia terletak pada kemampuan individu dalam bekerja serta manajemen maupun organisasi kerja. Dalam peningkatan produktifitas kerja sangat tergantung dari semangat buruh itu sendiri, antara lain mereka harus mau bekerja lebih tertarik, lebih baik dan merasa memiliki, dan di pihak manajemen perusahaan harus bersifat adil dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan, misalnya jika akan membayar atau menaikkan upah karyawan juga harus memperhatikan andilnya dalam produktifitas, dan jika akan memberikan bonus/*reward* sebaiknya menilai secara langsung hasil yang telah dicapai karyawan, sehingga penerima/karyawan segera mengetahui besar rupiah yang dia peroleh dari upayanya, jadi tidak harus menunggu hingga akhir tahun. Ada beberapa pendekatan dalam pemberian penghargaan, yaitu ; sistem prestasi kerja (*merit system*), sistem karier/senioritas, kombinasi dari dua sistem tersebut. (Mahmudi, 2007 : 177).

Yang menjadikan permasalahan antara tenaga kerja/buruh dengan pihak perusahaan, yaitu tentang upah/gaji buruh yang sangat minim, yang telah dibatasi oleh kesepakatan bersama yang berupa upah minimal regional (UMR) daerah. Sistem pengupahan sebagian perusahaan industri besar dan sedang, kurang memperhatikan tentang prestasi kerja maupun senioritas, masa kerja dan pengalaman kerja yang cukup lama tidak ada *reward*.

Pengelolaan tenaga kerja pada sektor industri besar dan sedang, cukup pelik dan harus berhati-hati, karena jumlahnya cukup besar dan mempunyai karakteristik yang beraneka ragam. Antara lain setiap karyawan memiliki identifikasi yang



berlainan; karena latar belakang pendidikan, watak, penampilan, kebutuhan, keinginan, cita-cita, kepentingan, kebiasaan dan pengalaman. Karena berlainan tersebut, maka perlu diciptakan motivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja, dengan cara disinergikan tiga komponen, antara pemerintah, pengusaha/organisasi pengusaha, karyawan/organisasi karyawan. Jika ketiga komponen ini bisa bekerja sama dan saling menghargai serta saling menghormati, maka semua akan mendapatkan keuntungan. Ada pesan falsafah TRI DHARMA untuk meningkatkan motivasi kerja serta menjalin keharmonisan ketiga komponen tersebut yang perlu diamalkan, antara lain :

1. *Rumongso Handarbani* (merasa ikut memiliki).
2. *Melu Hangrungkepi* (ikut serta memelihara, mempertahankan, dan melestarikan).
3. *Mulat seriro Hangroso wani* (terus menerus mawas diri).

Apabila ketiga falsafah tri dharma tersebut di atas saling dipahami oleh ketiga komponen : pemerintah, pengusaha/organisasi pengusaha, karyawan / organisasi karyawan, permasalahan pihak buruh terhadap pihak perusahaan dapat dicegah dan bisa diminimalisir, sehingga kemungkinan PHK tidak akan terjadi.

Agar para pembaca dan para pengambil kebijakan tidak salah tafsir, maka perlu disampaikan konsep/definisi tentang industri pengolahan besar dan sedang. (Statistik Indonesia, 2007 : 235).

**Industri pengolahan** (BPS, 2007) adalah suatu unit produksi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar (bahan baku/bahan mentah) menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.



Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*).

**Jasa industri** (BPS, 2007) adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa (upah makloon), misalnya perusahaan penggilingan padi yang melakukan kegiatan menggiling padi/gabah petani dengan balas jasa tertentu.

**Perusahaan atau usaha industri** (BPS, 2007) adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Industri pengolahan (BPS, 2007) dikelompokkan menjadi empat golongan berdasarkan banyaknya pekerja, yaitu :

1. Industri Besar adalah perusahaan industri yang mempunyai pekerja 100 orang atau lebih.
2. Industri Sedang adalah perusahaan industri yang mempunyai pekerja antara 20 – 99 orang.
3. Industri Kecil adalah perusahaan industri yang mempunyai pekerja antara 5 – 19 orang.
4. Industri Kerajinan Rumah tangga adalah perusahaan industri yang mempunyai pekerja antara 1 – 4 orang.

Penggolongan perusahaan industri pengolahan ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu.

Sedangkan konsep dan definisi **jumlah tenaga kerja** adalah banyaknya pekerja/karyawan rata-rata perhari kerja baik pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar.

Pekerja Produksi adalah pekerja yang langsung bekerja dalam proses produksi atau berhubungan dengan itu, termasuk pekerja yang langsung mengawasi proses produksi, mengoperasikan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan.

Pekerja lainnya adalah pekerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, pekerja ini biasanya sebagai pekerja pendukung perusahaan, seperti manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga malam, sopir perusahaan, dan lain-lain.

### **C. Penelitian Terdahulu**

Martini, 2008 dalam tesisnya berjudul Studi Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Wonogiri Tahun 1993 – 2007. Variabel penelitian ini meliputi jumlah penduduk, PDRB, dan jumlah wisatawan. Dari hasil analisis yang didapat, hanya variabel PDRB yang berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri. Sedangkan variabel jumlah penduduk dan jumlah

wisatawan yang datang ke Kabupaten Wonogiri tidak dijumpai pengaruh yang nyata terhadap PAD.

(Triani dan Yeni, 2010), dalam ASET Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.12 No.1 Maret 2010: 87-94 yang berjudul Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 di Kabupaten Karanganyar dengan variabel penelitiannya adalah variabel dependen : Pendapatan Asli daerah (PAD) sedangkan variabel bebasnya adalah PDRB, Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi. Dengan menggunakan analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar.
2. Variabel jumlah penduduk secara statistik signifikan berpengaruh terhadap penerimaan PAD .
3. Variabel inflasi menunjukkan berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD.
4. Ketiga variabel makro (PDRB, jumlah penduduk, inflasi) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PAD.

(Aryanti & Indarti, 2010), dalam ASET Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.28 No.2 Oktober 2010: 133-151 dengan judul Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang dengan variabel dependen adalah Pendapatan Asli daerah (PAD) sedangkan variabel bebas adalah PDRB, Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi. Dengan menggunakan alat analisis berupa analisis kuantitatif yang dilakukan dalam dua langkah yaitu asumsi klasik dan uji regresi linier berganda diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel PDRB berpengaruh positif terhadap PAD.



2. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD.
3. Variabel inflasi secara statistik tidak berpengaruh terhadap penerimaan PAD.
4. Variabel PDRB, jumlah penduduk, inflasi memiliki pengaruh terhadap PAD.

Purbayu Budi Santiso dan Retno Puji Rahayu, dalam jurnal *Dinamika Pembangunan*, Vol.2 No. 1 Juli 2005: 9-18 yang berjudul *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri dengan menggunakan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah dan variabel bebas yang berupa Total Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, dan PDRB*. Dengan menggunakan metode analisis analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik suatu persamaan regresi maka diperoleh kesimpulan bahwa data tersebut harus dilakukan transformasi. Selanjutnya fungsi regresi tersebut akan ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma berganda dengan menggunakan logaritma natural(ln) (Damodar Gujarati, 1991). Secara bersama-sama variabel pengeluaran pembangunan, penduduk, dan PDRB mampu menerangkan dengan variabel dependennya yaitu variabel PAD. Dari ketiga variabel tersebut yang mempunyai pengaruh paling besar yaitu variabel jumlah penduduk

Muchtholifah, dalam jurnal *Ilmu Ekonomi Pembangunan* Vol. 1 No.1 Januari 2010, dengan judul *Pengaruh PDRB, Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto dengan menggunakan variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan variabel independen PDRB, Inflasi, Investasi Industri, Jumlah Tenaga Kerja*.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik maka didapat suatu hasil analisis yaitu secara simultan bahwa PDRB,

Inflasi, investasi industri, dan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto. Variabel yang paling berpengaruh terhadap PAD adalah variabel PDRB, karena variabel ini memiliki koefisien determinasi paling besar dari nilai ketiga variabel lain.

Hidayatullah A. Taufiq, 2011 dalam skripsi yang berjudul Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB Tahun 2005-2008, dengan menggunakan variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah dan variabel independen : PDRB, Jumlah Penduduk, Inflasi.

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Estimasi *Random Effect* sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa PDRB tidak mempengaruhi PAD secara signifikan, sedangkan jumlah penduduk mempengaruhi PAD secara signifikan positif dan inflasi mempengaruhi PAD secara signifikan negatif. Secara bersama-sama PDRB, Jumlah Penduduk dan Inflasi berpengaruh terhadap PAD.

Gde Bhaskara Perwira Jaya dan AA Bagus Putu Widanta dalam jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.3 No.5 Mei 2014 yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap PAD Kota Denpasar dengan menggunakan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah dan variabel independen adalah PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Wisatawan. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda diperoleh kesimpulan sebagai berikut : PDRB, jumlah penduduk, jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar tahun 1997-2011. PDRB berpengaruh positif terhadap PAD Kota Denpasar, Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD Kota Denpasar,



sedangkan jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Denpasar.

Putu Lia Perdana Sari dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Jinh Vol.2 No.2 Juni 2013, yang berjudul Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. Dengan menggunakan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah dan variabel independennya adalah pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan, Investasi, PDRB. Teknik analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. PAD Provinsi Bali periode 1991-2009 dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah kunjungan wisata mancanegara secara positif
2. Tingkat investasi memiliki pengaruh positif terhadap PAD Provinsi Bali periode 1991-2009
3. PAD Provinsi Bali periode 1991-2009 juga dipengaruhi secara positif oleh PDRB.

#### **D. Kerangka pemikiran**

Berdasar hasil-hasil penelitian yang terdahulu, maka variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Disamping pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan dari PAD yang lain adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah serta dana bagi hasil pajak yang akan menopang tingkat kemandirian daerah. Kemandirian daerah menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana



eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya (Kadafi dan Wendy, 2013 dalam Darmayasa dan Bagiada, 2013:).

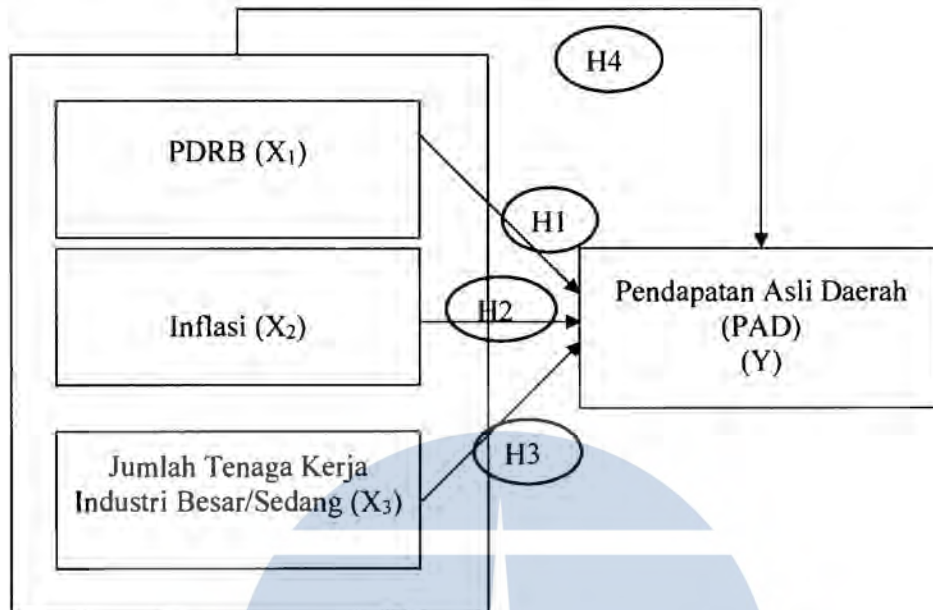
Penjabaran di atas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Kemandirian Daerah. Pajak, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Dana Bagi Hasil Pajak yang tinggi berarti jumlah uang yang masuk ke kas daerah semakin banyak, sehingga pemerintah daerah berupaya untuk memajukan perekonomian daerahnya.

Daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi berarti kabupaten/kota tersebut mampu memenuhi kebutuhannya tanpa melibatkan pihak luar, dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Campur tangan pemerintah pusat lebih kecil jika kemandirian daerah tersebut tinggi. Namun sebaliknya, jika kemandirian kecil campur tangan pemerintah pusat semakin besar (*Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016*). Daerah yang mandiri berarti laju perekonomian meningkat, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami peningkatan.

Melihat akan pentingnya PAD bagi suatu daerah dan berdasarkan tentang adanya *research gap* antara penelitian yang dilakukan oleh Triani (2010) dengan Aryanti dan Indarti (2010), Purbayu dan Rahayu (2005) serta Muchtholifah (2010) dengan Taufiq (2011) maka perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memperjelas pengaruh tingkat PDRB dan inflasi terhadap PAD. Selain itu penulis ingin mengetahui faktor-faktor diluar komponen APBD yang dapat dipakai untuk memperkirakan peningkatan/penurunan PAD dan dapat digunakan untuk alat perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengendalian anggaran sesuai prinsip manajemen yang dapat dipakai oleh pemegang kekuasaan di tingkat daerah. Hal

tersebut mendasari pemikiran penulis supaya variabel-variabel non APBD dapat digunakan dalam perencanaan dan penyusunan suatu anggaran daerah.

Kerangka pemikiran tersebut apabila dituangkan dalam bentuk denah/bagan dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis**

**Keterangan :**

- H1. PDRB berpengaruh terhadap PAD.
- H2. Inflasi berpengaruh terhadap PAD.
- H3. Jumlah tenaga kerja pada industri besar dan sedang berpengaruh terhadap PAD.
- H4. PDRB, inflasi dan jumlah tenaga kerja pada industri besar dan sedang berpengaruh terhadap PAD.

## E. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. **Tingkat Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap penerimaan PAD kabupaten-kabupaten di eks Karesidenan Pati**

PDRB adalah sejumlah nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatannya di suatu daerah atau regional tanpa memilik atas faktor produksi (Arsyad, 1992:163), sehingga PDRB sering dipakai sebagai indikator makro ekonomi untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sehingga apabila PDRB naik maka pendapatan suatu daerah juga diperkirakan akan ikut naik. Sebagai sebuah hipotesis tentunya pernyataan ini masih perlu untuk diuji kebenarannya dalam menganalisis suatu permasalahan yang dihadapi. Tetapi hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martini, Aryani dan Indarti, Purbayu, Muchtholifah, Gde Baskara dan Putu Lia dimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan PAD adalah berpengaruh positif dan signifikan, sehingga terkait hal tersebut maka hipotesis pertama yang akan diuji adalah :

H1 : Tingkat Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap penerimaan PAD kabupaten-kabupaten di eks Karesidenan Pati.

### 2. **Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PAD kabupaten-kabupaten di eks Karesidenan Pati**

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga dari sekumpulan komoditas barang/jasa secara umum yang terjadi terus-menerus pada suatu waktu. Sehingga inflasi sering dipakai sebagai indikator makro ekonomi untuk mengetahui



banyaknya uang beredar dan tingkat perubahan ekonomi sesuai dengan perubahan harga. Menurut penelitian sebelumnya, pengaruh inflasi terhadap penerimaan PAD menurut Muchtholifah berpengaruh positif, sedangkan menurut Triani dan Hidayatullah inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD tetapi menurut Aryanti dan Indarti inflasi secara statistik tidak berpengaruh terhadap penerimaan PAD. Berdasarkan informasi tersebut maka hipotesis kedua yang akan diuji adalah sebagai berikut :

H2 : Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PAD kabupaten-kabupaten di eks Karesidenan Pati

### **3. Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang berpengaruh terhadap penerimaan PAD kabupaten-kabupaten di eks Karesidenan Pati**

Industri besar sedang adalah sektor industri yang menyerap banyak tenaga kerja yang bisa bekerja tanpa keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan tertentu. Dengan banyaknya tenaga kerja yang diserap tentu akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian suatu daerah, karena upah yang diterima oleh para pekerja akan dibelanjakan dan tentunya perputaran ekonomi akan semakin besar. Dengan adanya ekonomi yang tumbuh maka akan berpengaruh terhadap PAD suatu daerah dan hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muchtholifah dimana pengaruh tenaga kerja terhadap penerimaan PAD adalah signifikan dan positif. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketiga yang akan diuji adalah sebagai berikut :

H3 : Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang berpengaruh terhadap penerimaan PAD kabupaten-kabupaten di eks Karesidenan Pati.

**4. Tingkat PDRB, Inflasi dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PAD kabupaten-kabupaten di eks Karesidenan Pati**

Berdasar informasi penelitian sebelumnya, maka akan diuji secara serempak faktor-faktor non-APBD yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD kabupaten-kabupaten di eks Karesidenan Pati dalam hipotesis yang keempat sebagai berikut :

- H4 : Tingkat PDRB, Inflasi dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PAD kabupaten-kabupaten di eks Karesidenan Pati.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dimana dengan metode ini menekankan analisisnya pada data-data *numerical* (angka) yang diolah dengan metode statistika. Penggunaan metode statistika digunakan untuk melakukan analisis dengan pendekatan *inference* yaitu melalui pengujian hipotesis dan pengambilan keputusan sesuai dengan hasil probabilitas statistik dibandingkan dengan tingkat signifikansi dari variabel yang diuji, apakah hipotesa tersebut diterima atau ditolak.

#### A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah studi kasus dimana perhatiannya pada permasalahan PDRB, inflasi dan jumlah tenaga kerja industri besar/ sedang terhadap PAD di kabupaten-kabupaten Eks Karesidenan Pati.

#### B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 daerah kabupaten/kota. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *non probability purposive sampling* berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*). *Judgment sampling* merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan tersebut antara lain eks Karesidenan Pati (Kabupaten Blora,



Rembang, Pati, Kudus dan Jepara) memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan PAD pada tahun 2002-2013 karena memiliki sektor perdagangan yang cukup besar, sumber daya alam yang potensial dan memiliki beberapa industri yang dapat memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.

Tabel 3.1  
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Nama Kabupaten/Kota	Populasi	Sampel
1.	Kabupaten Cilacap	V	
2.	Kabupaten Banyumas	V	
3.	Kabupaten Purbalingga	V	
4.	Kabupaten Banjarnegara	V	
5.	Kabupaten Kebumen	V	
6.	Kabupaten Purworejo	V	
7.	Kabupaten Wonosobo	V	
8.	Kabupaten Magelang	V	
9.	Kabupaten Boyolali	V	
10.	Kabupaten Klaten	V	
11.	Kabupaten Sukoharjo	V	
12.	Kabupaten Wonogiri	V	
13.	Kabupaten Karanganyar	V	
14.	Kabupaten Sragen	V	
15.	Kabupaten Grobogan	V	
16.	Kabupaten Blora	V	V
17.	Kabupaten Rembang	V	V
18.	Kabupaten Pati	V	V
19.	Kabupaten Kudus	V	V
20.	Kabupaten Jepara	V	V
21.	Kabupaten Demak	V	
22.	Kabupaten Semarang	V	
23.	Kabupaten Temanggung	V	
24.	Kabupaten Kendal	V	
25.	Kabupaten Batang	V	
26.	Kabupaten Pekalongan	V	
27.	Kabupaten Pemalang	V	
28.	Kabupaten Tegal	V	
29.	Kabupaten Brebes	V	
30.	Kota Magelang	V	
31.	Kota Surakarta	V	
32.	Kota Salatiga	V	
33.	Kota Semarang	V	
34.	Kota Pekalongan	V	
35.	Kota Tegal	V	

### C. Instrumen Penelitian

Variabel yang akan diteliti pada dasarnya berupa sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari supaya diperoleh suatu informasi tentang hal tersebut, kemudian dihasilkan suatu kesimpulan. Analisa regresi berkenaan dengan studi ketergantungan dari satu variabel pada lebih variabel yang lain pada umumnya dikategorikan menjadi : variabel dependen yang identik dengan tergantung/tak bebas, yaitu variabel yang variabelitasnya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas atau *independent variable*. Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang variabelitasnya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi (Narimawati, 2008 : 40 – 41).

Sedangkan menurut Kerlinger (2006) dalam Wijaya (2009:5), yang dimaksud dengan variabel adalah simbol atau lambang yang melekat pada bilangan atau nilai. Definisi operasional variabel bebas adalah suatu variabel yang fungsinya menerangkan (mempengaruhi) terhadap variabel lainnya. Variabel ini dalam notasinya seringkali diberi notasi X (bisa X1 X2 X3 X4, dst), sedangkan Variabel tidak bebas ialah suatu variabel yang dikenai pengaruh (diterangkan) oleh variabel lain. Variabel ini dalam notasinya sering ditulis dengan Y (Wijaya, 2009:5).

Dalam penelitian ini variabel tak bebas adalah PAD (Y), sedangkan variabel bebas meliputi PDRB (X<sub>1</sub>), inflasi (X<sub>2</sub>), dan banyaknya tenaga industri besar dan sedang (X<sub>3</sub>). Model yang digunakan adalah :



$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + e_i$$

#### D. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang merupakan hasil publikasi dari dinas/instansi terkait yang ada di wilayah eks Karesidenan Pati. Data tersebut juga diperoleh dari hasil publikasi Blora Dalam Angka, Rembang Dalam Angka, Pati Dalam Angka, Kudus Dalam Angka, Jepara Dalam Angka dan divalidasi dengan publikasi Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2002-2014. Data yang akan digunakan penelitian berupa data runtun waktu atau *time series* dengan jangka waktu 12 tahun dari tahun 2002 sampai tahun 2013, yang meliputi PDRB, inflasi, jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang dan PAD.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka atau kajian dokumen. Studi pustaka atau kajian dokumen adalah pengumpulan data bersumber dari surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya yang dipublikasikan (Sarwono, 2007:225).

Dari hasil studi pustaka tersebut diperoleh data sekunder yang berupa *time series* dari tahun 2002 – 2013, baik yang diperoleh dari publikasi Blora Dalam Angka, Rembang Dalam Angka, Pati Dalam Angka, Kudus Dalam Angka, Jepara Dalam Angka yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten atau Provinsi Jawa Tengah



Dalam Angka yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah serta beberapa informasi tambahan dari dinas/instansi/website terkait.

#### **F. Definisi Operasional Variabel**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap istilah dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka dijelaskan perihal batasan operasional variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. PDRB adalah Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku Kabupaten di eks Karesidenan Pati per tahun yang diukur dalam satuan juta rupiah.
2. Inflasi adalah inflasi kumulatif dalam satu tahun anggaran Kabupaten di eks Karesidenan Pati per tahun yang diukur dalam persen.
3. Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang adalah banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor industri pengolahan dengan jumlah pekerja lebih dari atau sama dengan 20 orang yang diukur dalam satuan orang.
4. PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah diperoleh dari data sekunder publikasi daerah dalam angka, sedangkan besarnya Pendapatan Asli Daerah per tahun yang diukur dalam satuan ribu rupiah.

#### **G. Metode Analisis Data**

Setelah dilakukan pengumpulan data ke dinas/instansi terkait, peneliti selanjutnya mengolah dan menganalisis. Tujuan analisis ini untuk mengetahui

seberapa besar variabel dependen (PAD) dipengaruhi oleh variabel independen (PDRB, inflasi dan jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang di Kabupaten-kabupaten di eks Karesidenan Pati). Dalam melakukan analisis data dipergunakan alat bantu perangkat lunak analisis statistik yaitu dengan menggunakan SPSS versi 17.0.

### 1. Analisis Linier Regresi Berganda

Cara penulisan variabel ke dalam persamaan normal regresi adalah sebagai berikut :

- a. Variabel tidak bebas/tergantung, atau *dependent variable* = Y, yaitu variabel yang akan diramalkan, harus ditulis di sebelah kiri tanda sama dengan (=)
- b. Variabel bebas atau *independent variable* =  $X_i$ , yaitu variabel yang nilainya untuk meramalkan, harus ditulis di sebelah kanan tanda sama dengan (=).

Persamaan normal dari fungsi PAD sebagai berikut :

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i$$

di mana :

$\hat{Y}$  = variabel PAD

$\beta_0$  = konstanta dari persamaan regresi, yaitu merupakan jarak titik asal nol dengan perpotongan antara sumbu tegak Y dengan garis fungsi linier  $\hat{Y}$ , kalau  $X = 0$ .

$\beta_i (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$  = koefisien regresi atau koefisien arah, yaitu besarnya pengaruh X terhadap Y. Kalau X naik satu unit, maka Y bertambah  $\beta$  unit.

- $X_1$  = variabel PDRB.  
 $X_2$  = variabel inflasi  
 $X_3$  = variabel jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang  
 $e$  = residual atau kesalahan pengganggu.

## 2. Uji Statistik

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui parameter koefisien regresi, atau parameter  $\beta$  jika penelitian hasilnya positif artinya bahwa hubungan PDRB, inflasi jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang dengan PAD searah, jika makin tinggi ketiga variabel independen tersebut maka PAD juga meningkat.

### a. Uji ketepatan parameter penduga (statistik uji t)

Hipotesis yang diuji dalam uji t adalah :

$H_0 : \beta = 0$ , artinya variabel PDRB, inflasi atau jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang secara individu bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap PAD, atau  $X_i$  tidak mempengaruhi Y.

$H_a : \beta \neq 0$ , artinya variabel PDRB, inflasi atau jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang secara individu merupakan penjelas yang signifikan terhadap PAD, atau  $X_i$  mempengaruhi Y.

$t_{hitung}$  didapat dari  $\frac{\beta_i}{S\beta_i}$  dimana  $i = 0, 1, 2, 3$ .

Dan  $t_{tabel}$  yaitu  $t_{(\alpha = 0.05)(n-k)}$  dalam tes uji statistik t, didapat hasil sebagai berikut :

- 1)  $t_{hitung} > t_{tabel}$  berarti  $H_0$  ditolak, dengan demikian variabel  $X_i$  berpengaruh signifikan terhadap Y (Supranto, 1983 : 253 – 254), atau



2) pengaruh suatu variabel dianggap signifikan jika nilai  $t_{hitung} \geq 2$  atau nilai  $t_{hitung} \leq -2$  maka variabel penjelas terhadap variabel yang diteliti eksis atau ada (Setiaji, 2009 : 32).

#### b. Uji hipotesis koefisien regresi secara serentak dengan statistik uji F

Uji statistik F pada dasarnya untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Maka dilakukan uji dengan formula sebagai berikut :

$$F_{hitung} = \frac{\text{rata-rata kuadrat regresi}}{\text{rata-rata kuadrat residual}} = \frac{RKR}{RKS} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-1)}$$

dan  $F_{tabel} = F_{(\alpha=0,05)(k-1)(n-k)}$ , dimana :

$R^2$  = koefisien determinasi

$n$  = jumlah pengamatan (*series data*)

$k$  = jumlah variabel independen dan dependen

Hipotesis yang diuji dalam uji F adalah

$H_0 : \beta = 0$ , artinya semua variabel independen yaitu PDRB, inflasi dan jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang secara bersama-sama bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap PAD.

$H_a : \beta \neq 0$ , artinya semua variabel independen yaitu PDRB, inflasi dan jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang secara bersama-sama merupakan penjelas yang signifikan terhadap PAD.

Dalam tes uji statistik F didapat hasil sebagai berikut :

- 1)  $F_{hitung} > F_{tabel}$  berarti  $H_0$  ditolak, dengan demikian variabel  $X_i$  secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap  $Y$  (Supranto, 1983 : 257 – 258), atau
- 2) Jika  $F_{hitung}$  sudah lebih besar dari 4 maka model yang diuji dengan pilihan variabel tersebut di atas (3 variabel independen) sudah tepat (*fit*) (Setiaji, 2009 : 44).

### c. Uji Asumsi Klasik (*Ordinary Least Square*)

Formulasi atau rumus regresi diturunkan dari suatu asumsi data tertentu. Dengan demikian tidak semua data dapat diterapkan sebagai regresi. Jika data tidak memenuhi regresi, maka penerapan regresi akan menghasilkan estimasi yang bias. Jika data memenuhi asumsi regresi maka estimasi ( $\beta$ ) yang diperoleh akan bersifat *Best, Linear, Unbiased, Estimation* (BLUE). Setiaji (2008 : 46).

Teori **Gauss-Markov** : Berdasarkan seluruh asumsi dari model regresi linear klasik, pemeriksa dari hasil metode kuadrat terkecil, dalam kelas pemeriksa linear tak bias, mempunyai varian terkecil/minimum, disingkat BLUE. Asumsi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- 1). *Best*, dalam arti garis regresi merupakan estimasi atau ramalan yang baik dari suatu sebaran data, yaitu menghasilkan garis regresi yang errornya terkecil ( $e_i$ ) mendekati nol. Error itu sendiri adalah merupakan perbedaan antara nilai observasi dan nilai yang diramalkan oleh garis regresi;

- 2). *Linear*, bila estimasi  $\beta$  merupakan fungsi linear dari sampel. Fungsi regresi populasi merupakan fungsi regresi sebenarnya, apabila kita hanya menyelidiki sampel, bukan populasi. Jadi yang kita peroleh fungsi regresi sampel;
- 3). *Unbiased*, jika nilai harapan dari estimator  $\beta$  sama dengan nilai yang benar dari  $\beta$ ;
- 4). *Efficient estimator*, memiliki varian yang minimum diantara pemerkiraan lain tak bias.

Supaya dalam penelitian ini valid, maka sangat diperlukan variabel-variabel bebas yang diharapkan berpengaruh terhadap variabel tak bebas, diharapkan berdistribusi normal, residualnya tidak memiliki varian konstan, koefisien regresi tak bias dan antara variabel-variabel bebas berkorelasi tak sempurna. Maka diperlukan pengujian normalitas, multikolinearitas, otokorelasi dan uji heteroskedastisitas terhadap variabel-variabel tersebut.

### 1). Uji Normalitas

#### a). Pengertian

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Dalam regresi linier berganda disyaratkan memiliki nilai residual terdistribusi normal. Yaitu nilai residual  $e$  memiliki rata-rata nol, berarti garis regresi pada nilai variabel bebas tertentu tepat di tengah-tengah sehingga rata-rata error yang di atas regresi dan di bawah regresi kalau dijumlahkan hasilnya nol jika variabel pengganggu  $e$  berdistribusi normal. Maka variabel yang diteliti ( $Y$ ) juga berdistribusi normal.



b). Cara menguji normalitas

Cara menguji normalitas dilakukan dengan analisa grafik dan uji *Kolmogorov-Smirnov (K-S test)* sebagai berikut :

Analisa grafik dari normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Namun terkadang dengan melihat histogram ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat sebaran data pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Adapun keputusan yang dapat diambil adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal *Normal P-P Plot* dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

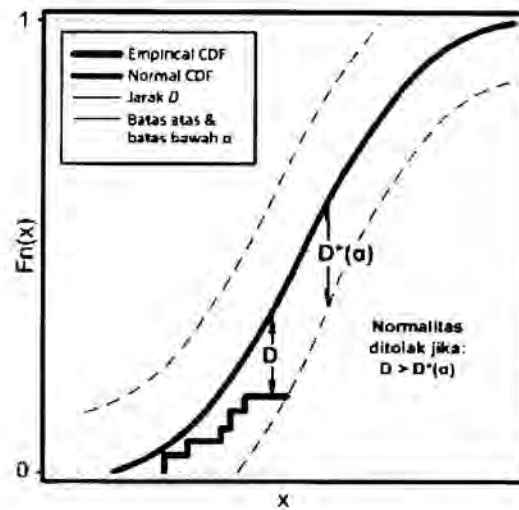
*Kolmogorov-Smirnov test (K-S test)* merupakan pengujian statistik *non-parametric* yang paling mendasar dan paling banyak digunakan dan dimanfaatkan untuk uji satu sampel (*one-sample test*) yang memungkinkan perbandingan suatu distribusi frekuensi dengan beberapa distribusi terkenal, seperti distribusi normal.

Konsep dasar K-S test yaitu mengukur perbandingan data empirik dengan data berdistribusi normal teoritik yang memiliki *mean* dan standar deviasi yang sama dengan data empirik. Menurut Kolmogorov (1992), suatu fungsi distribusi empirik (EDF, *empirical distribution function*)  $F_n(x)$  didefinisikan sebagai relasi-relasi

$$F_n(x) = 0, \quad x < X_1;$$

$$F_n(x) = k/n, \quad X_k \leq x < X_{k+1}, \quad k = 1, 2, \dots, n-1;$$

$$F_n(x) = 1, \quad X_n \leq x.$$



Gambar 3.1.

Jarak vertikal  $D$  pada grafik Kolmogorov–Smirnov test

K-S *test* mengukur kedekatan jarak antara  $F(x)$  dengan  $F_n(x)$  ketika  $n$  diasumsikan sebagai nilai yang sangat besar, Kolmogorov (1992) mendefinisikan fungsi distribusi kumulatifnya atau CDF (*cumulative distribution function*) adalah sebagai berikut:

$$D = \sup_x |F_n(x) - F(x)|$$

yang mana  $\sup_x$  adalah *supremum* dari sejumlah jarak  $D$ .

Secara grafik,  $D$  adalah jarak vertikal terjauh antara  $F_n(x)$  dan  $F(x)$ . Nilai  $D$  ini selanjutnya dibandingkan dengan nilai  $D^*(\alpha)$  kritis dari sebuah tabel statistik untuk pengujian  $\alpha$  (lihat Gambar 3.1).

Dalam hal ini yang akan diuji adalah residual dari *unstandardize* pada model regresi linier berganda dengan uji Kolmogorov–Smirnov (*P-value*) yang tercantum dalam *Asymp. Sig. (2-tailed)* dengan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka kesimpulannya adalah data berdistribusi normal
- Sebaliknya jika nilai signifikansi kurang besar dari 0,05 maka kesimpulannya adalah data tidak berdistribusi normal.

c).Akibat apabila data tidak berdistribusi normal

Akibat dari data yang tidak berdistribusi normal adalah penggunaan uji  $t$  dan  $F$  yang diturunkan dari asumsi bahwa data  $Y$  atau pengganggu  $e$  berdistribusi normal tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan asumsi itu sendiri dan bila tetap dilakukan maka akan berpengaruh terhadap kesimpulan karena akan menghasilkan keputusan yang *bias* dan menyesatkan.

Untuk mengatasi data yang tidak normal dapat dilakukan dengan : pemotongan data yang jauh dari rata-rata (*outliers*) bisa sangat tinggi atau sangat rendah, memperbesar jumlah sampel, atau dilakukan transformasi data misalnya dilogaritmakan (Setiaji, 2008 : 53).

## 2).Uji Heteroskedastisitas

a).Pengertian

Dalam regresi diperoleh asumsi bahwa variabel pengganggu  $e$  (error) diasumsikan memiliki varian yang konstan, yaitu rentangan  $e$  kurang lebih sama. Jika ternyata varian  $e$  tidak konstan, misalnya membesar atau mengecil, dengan kata lain varian  $e$  untuk setiap  $X_i$  tidak konstan/sama, maka kondisi tersebut dikatakan tidak homoskedastik atau mengalami heteroskedastik. Hal seperti ini terjadi biasanya pada data yang terlalu heterogen.



### b). Cara menguji heteroskedastisitas

Untuk pengujian heteroskedastisitas dalam analisis ini adalah dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pertama dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel independen yaitu ZPRED dengan residunya yaitu SRESID, dimana dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot* adalah sebagai berikut :

- Jika terdapat pola tertentu pada grafik *scatterplot* SPSS, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, menyebar kemudian menyempit) maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.
- Sebaliknya, jika tidak terjadi pola yang jelas serta titik-titik menyebar, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Sedangkan cara yang kedua adalah dengan Uji *Glejser* dimana uji ini mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap nilai variabel bebas dengan persamaan regresi :

$$|U_t| = a + bX_t + v_t$$

Dimana :  $|U_t|$  = nilai absolut residual

$a, b$  = konstanta

$X_t$  = nilai variabel bebas

$v_t$  = *error* dalam model

Sedangkan dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas ini adalah :

- Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas

- Sebaliknya jika nilai signifikansi kurang besar dari 0,05 maka kesimpulannya adalah telah terjadi heteroskedastisitas.

c). Akibat adanya heteroskedastisitas

Parameter estimasi ( $\beta$ ) yang diperoleh tetap tidak bias. Akan tetapi, standar error ( $S_{b_i}$ ) yang kita peroleh bias, yaitu memperoleh varian yang lebih kecil atau lebih besar. Akibatnya uji t dan uji F menjadi tidak menentu. Jika  $S_{b_i}$  bias mengecil uji t akan terlihat lebih besar dari yang sebenarnya, akibatnya variabel yang sebenarnya tidak signifikan akan terlihat signifikan, dan terjadi sebaliknya. Jika terjadi heteroskedastisitas akan didapat informasi yang tidak benar.

Untuk mengatasi model yang mengalami heteroskedastisitas yaitu dengan melakukan transformasi logaritma normal; model *Weighted Least Square* (WLS) yaitu membagi semua data dengan  $\hat{Y}$ ; transformasi dengan membagi semua variabel dengan  $\sqrt{X_i}$ ; membagi semua variabel dengan variabel lain. Setiaji (2008 : 60).

### 3). Uji Autokorelasi

a). Pengertian

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana terdapat trend di dalam variabel yang diteliti sehingga mengakibatkan  $e$  juga mengandung trend. Gejala autokorelasi biasanya sering terjadi pada data runtun waktu (*time series*). Autokorelasi terjadi apabila antara variabel  $e_t$  dengan  $e_{t-1}$  terdapat korelasi yang kuat.

Jika ternyata ada korelasi maka hubungan menjadi tidak jelas, apakah peningkatan Y disebabkan peningkatan dirinya sendiri atau karena pengaruh variabel bebas X.

b). Cara menguji autokorelasi

Untuk menguji autokorelasi dapat digunakan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan formulasi sebagai berikut :

$$d = 2 \left( 1 - \frac{\sum e_i \cdot e_{i-1}}{e_i^2} \right)$$

Dengan hipotesis sebagai berikut :

Ho = tidak ada autokorelasi

H1 = ada autokorelasi

Setelah mendapatkan statistik uji, langkah selanjutnya adalah membandingkan dengan tabel DW. Tabel DW terdiri atas dua nilai, yaitu batas bawah (dl) dan batas atas (du). Berikut beberapa keputusan setelah membandingkan DW.

- Bila nilai DW terletak antara batas atas atau *upper bound* (du) dan  $(4 - du)$ , maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti **tidak ada autokorelasi**.
- Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada **autokorelasi positif**.
- Bila nilai DW lebih besar daripada  $(4 - dl)$ , maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada **autokorelasi negatif**.



- Bila nilai DW terletak di antara batas atas ( $d_U$ ) dan batas bawah ( $d_L$ ) maka hasilnya **tidak dapat disimpulkan**.
- Bila nilai DW terletak antara  $(4 - d_U)$  dan  $(4 - d_L)$ , maka hasilnya **tidak dapat disimpulkan**.

Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.2  
Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson

Setelah kita memperoleh nilai uji durbin watson yang perlu kita lakukan yaitu membandingkan dengan durbin watson tabel sehingga kita akan memperoleh kesimpulan apakah terdapat autokorelasi atau tidak. Untuk itu kita perlu mengetahui nilai tabel durbin watson.

Sebelum kita memulai pertama yang dilakukan adalah titik kritis (*alfa*), jumlah sampel ( $T$ ) dan jumlah variabel ( $k$ ) yang kita gunakan.

Contoh:

Misalkan diketahui jumlah data=12 dan dalam penelitian ini menggunakan 1 variabel *dependen* dan 3 variabel *independen* sehingga total variabel ada 4, dengan titik kritis yang digunakan 5% setelah dilakukan analisis diperoleh nilai uji dw sebesar 1,933.

Berdasarkan tabel yang diperoleh dari tabel Durbin Watson dan diperoleh dengan tingkat kepercayaan sebesar  $\alpha=5\%$ ,  $T=12$ ,  $K=4$  maka diperoleh nilai  $d_l = 0,65765$  dan  $d_u = 1,186397$ .

Tahap selanjutnya yaitu menghitung untuk nilai  $(4-d_l)$  dan  $(4-d_u)$ . Setelah dihitung diperoleh:  $(4-d_l) = 3,34235$  dan  $(4-d_u) = 2,13603$ .

Dari hasil di atas kita peroleh 4 angka kemudian diurutkan angkanya sehingga menjadi  $0,65765$ ;  $1,186397$ ;  $2,13603$ ;  $3,34235$ . Kemudian kita ambil nilai uji DW yang sudah diperoleh sebelumnya yaitu  $1,933$  dan kita lihat angka itu berada di antara angka yang mana dan diperoleh antara  $1,186397(d_u)$  dan  $2,13603(4-d_u)$ , bisa kita lihat pada gambar di atas atau penjelasan di atas. Sehingga apabila berada di antara  $d_u$  dan  $4-d_u$  maka kesimpulannya tidak terdapat autokorelasi. Sumber: Wikipedia, Stanford.

#### Mengatasi Autokorelasi (Setyahadi, Fardhan Anushi, dkk. 2014. STIS)

- Menambah variabel bebas  
Cara ini dapat dilakukan karena salah satu sebab munculnya autokorelasi adalah adanya variabel penting yang tidak dimasukkan ke dalam model (misspesifikasi model)
- Menggunakan variabel yang ditransformasi  
Dapat dilakukan jika penambahan variabel bebas ke dalam model tidak dapat mengatasi masalah autokorelasi.

$$Y'_t = Y_t - \rho Y_{t-1}$$

$$Y'_t = (\beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t) - \rho(\beta_0 + \beta_1 X_{t-1} + \varepsilon_{t-1})$$

$$Y'_t = \beta_0(1 - \rho) + \beta_1(X_t - \rho X_{t-1}) + (\varepsilon_t - \rho \varepsilon_{t-1})$$

Karena  $\varepsilon_t - \rho \varepsilon_{t-1} = u_t$ , maka :

$$Y'_t = \beta_0(1 - \rho) + \beta_1(X_t - \rho X_{t-1}) + u_t$$

$$Y'_t = \beta'_0 + \beta'_1 X'_t + u_t$$

Dimana :

$$Y'_t = Y_t - \rho Y_{t-1}$$

$$X'_t = X_t - \rho X_{t-1}$$

$$\beta'_0 = \beta_0(1 - \rho)$$

$$\beta'_1 = \beta_1$$

Estimasi  $\rho$  adalah  $r$ , maka bisa ditulis :

$$Y'_t = Y_t - rY_{t-1}$$

$$X'_t = X_t - rX_{t-1}$$

Jika tidak ada autokorelasi, maka bisa dikembalikan ke *original variable* dari  $\widehat{Y}'_t = b'_0 + b'_1 X'_t$  menjadi  $\widehat{Y} = b_0 + b_1 X$ .

Dimana :  $b_0 = \frac{b'_0}{1-r}$  dan  $b_1 = b'_1$

### (1). Prosedur Cochrane-Orcutt

Ada 3 tahap:

1. Estimasi  $\rho$

$$r = \frac{\sum_{t=2}^n e_{t-1} e_t}{\sum_{t=2}^n e_{t-1}^2}$$

2. Paskan model yang ditransformasi, yaitu regresikan  $Y'_t$  terhadap  $X'_t$  dimana  $Y'_t = Y_t - rY_{t-1}$  dan  $X'_t = X_t - rX_{t-1}$
3. Hitung statistik *durbin-watson*, jika masalah autokorelasi teratasi maka proses selesai. Jika masalah belum teratasi, lakukan proses dari awal dengan menghitung kembali nilai  $r$  dari persamaan hasil transformasi, dan seterusnya.

### (2). Prosedur Hildreth-Lu

Prosedur *Hildreth-Lu* menggunakan pendekatan yang sama untuk memperkirakan parameter autokorelasi  $\rho$  untuk digunakan dalam transformasi. Nilai  $\rho$  dipilih dengan prosedur *Hildreth-Lu*, yang



meminimalkan *sum square error* untuk model regresi yang ditransformasi.

$$SSE = \sum (Y'_t - \hat{Y}'_t)^2$$

$$SSE = \sum (Y'_t - b'_0 - b'_1 X'_t)^2$$

### (3). First Difference Procedure

Jika  $\rho = 1$ , maka  $\beta'_0 = \beta_0(1 - \rho) = 0$

Jadi:  $Y'_t = Y_t - Y_{t-1}$  dan  $X'_t = X_t - X_{t-1}$  dan  $\beta'_1 = \beta_1$

Transformasi:  $\hat{Y}'_t = b'_1 X'_t$

Bisa dikembalikan ke original variable jika tidak ada autokorelasi menjadi  $\hat{Y} = b_0 + b_1 X$

Dimana:

$$b_0 = \bar{Y} - b'_1 \bar{X} \text{ dan}$$

$$b_1 = b'_1$$

- Perbandingan dari 3 metode

(a). Estimasi dari  $\beta_1$  hampir sama

(b). Estimasi standar deviasi *Cochrane-Orcut* lebih kecil dari *Hildreth-Lu* dan *First Differences*; dan estimasi dari original variable lebih rendah dari yang lain ketika autokorelasi positif

(c). Ketiga transformasi (*Cochrane-Orcut*, *Hildreth-Lu*, *First Differences*) memberikan hasil estimasi dari  $\sigma^2$  (MSE), varian dari variabel pengganggu  $u_t$ .

c). Akibat adanya autokorelasi

Jika terdapat autokorelasi maka nilai parameter  $\beta_i$  yang diperoleh tetap linear dan tidak bias. Akan tetapi, varian  $S_{\beta_i}$  bias. Ini artinya parameter tidak efisien. Akibatnya, uji signifikansi variabel yang dilakukan dengan uji t, di mana nilai  $t = \frac{\beta}{S_{\beta_i}}$  tidak bisa ditentukan atau tidak sempurna.

Untuk memperbaiki model yang mengalami autokorelasi dapat digunakan metode beda derajat satu; rata-rata bergerak atau model-model *distributed lag* dan *auto regressive* (Setiaji, 2008 : 70).

#### 4). Uji Multikolinearitas

##### a). Pengertian

Multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linier yang *perfect* atau eksak diantara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model. Multikolinieritas digunakan untuk menguji suatu model apakah terjadi hubungan yang sempurna atau hampir sempurna antara variabel bebas sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh antara variabel-variabel itu secara individu terhadap variabel dependen. Pengujian ini untuk mengetahui apakah antar variabel bebas dalam persamaan regresi tersebut tidak saling berkorelasi. Untuk mendeteksinya dapat dengan melihat nilai toleransi dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), dimana menurut *Hair et al* dalam Duwi Priyatno (2009) variabel dikatakan mempunyai masalah multikolinieritas apabila nilai toleransi lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF lebih besar dari 10.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal*. Variabel Ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol.

b). Untuk mengetahui adanya multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi adalah sebagai berikut :

- Nilai *R square* yang dihasilkan oleh suatu estimasi sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi awal adanya multikolinieritas.
- Multikolinieritas dapat juga dilihat apabila nilai toleransi lebih kecil dari 0,1 atau nilai inflasi varian (VIF) cenderung besar mendekati 10, karena nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi, dimana  $VIF = 1/\text{toleransi}$  (<http://www.portal-statistik.com>).

c). Akibat adanya multikolinearitas

Jika antara variabel bebas memiliki korelasi sempurna maka nilai  $\beta$  tidak dapat ditentukan hasilnya. Demikian juga standar error ( $S\beta_i$ ) akan menjadi sangat besar. Jika multikolinearitas tidak begitu sempurna tetapi tetap tinggi akibatnya parameter estimasi  $\beta_i$  yang diperoleh tetap valid, tetapi  $S\beta_i$  akan bias membesar, akibatnya uji  $t = \frac{\beta_i}{S\beta_i}$  akan cenderung kecil atau akan menjadi bias pula.

Pada hakekatnya jika variabel bebas ( $X_i$ ) multikolinear maka variabel tersebut bersifat saling mewakili dalam mempengaruhi variabel tak bebas  $Y$ .



Penanganannya dibuat persamaan yang terpisah, seperti contoh formula berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Karena  $X_1$  dan  $X_2$  memiliki kolinearitas tinggi, maka regresi dapat dibuat menjadi dua model

$$Y = a + b_1X_1 + b_3X_3 + e \text{ dan}$$

$$Y = a + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Pada prinsipnya kita harus mengestimasi pengaruh (*impact*)  $X_1$  terhadap  $Y$  dan  $X_2$  terhadap  $Y$  secara terpisah tidak dapat bersama-sama.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Deskriptif

Analisis data statistik deskriptif dari variabel penelitian disertai penjelasan data dengan nilai minimum, nilai maksimum, *mean* dan standar deviasi. Berikut ini statistik deskriptif data penelitian yang terdiri dari variabel Pendapatan Asli Daerah, PDRB, Inflasi, dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang.

Tabel 4.1.  
Statistik Dekriptif Hasil Output SPSS

Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	60	153449912	15677504	169127416	67359865.65	3.698E7
PDRB	60	69263452	1811703	71075155	12335278.23	1.472E7
INF	60	15.51	2.26	17.77	7.0518	3.87124
IBS	60	144283	1762	146045	30737.75	34502.007
Valid N (listwise)	60					

Sumber : output SPSS, data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sampel sebanyak 60, dimana rata-rata PAD di eks Karesidenan Pati sebanyak Rp. 67,359 Milyar dengan nilai PAD terendah Rp. 15,677 Milyar yaitu di Kabupaten Rembang pada tahun 2002 dan tertinggi sebesar Rp. 169,127 Milyar di Kabupaten Pati tahun 2013 dengan standar deviasi Rp. 36,98 Milyar. Karena nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah lebih tinggi dari nilai standar deviasi maka dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sudah terdistribusi dengan baik.

Rata-rata jumlah PDRB di eks Karesidenan Pati sebesar Rp. 12,335 Trilyun dengan jumlah PDRB minimum Rp. 1,812 Trilyun di Kabupaten Blora dan

maksimum Rp. 71,075 Triliyun di Kabupaten Kudus dengan standar deviasi Rp. 1,472 Triliyun. Karena nilai rata-rata PDRB lebih tinggi dari nilai standar deviasi maka dapat dikatakan bahwa PDRB sudah terdistribusi dengan baik.

Rata-rata Inflasi di di eks Karesidenan Pati adalah sebesar 7,05 persen. Nilai minimum dari Inflasi adalah sebesar 2,26 persen di Kabupaten Blora tahun 2011 dan nilai maksimum 17,77 persen di Kabupaten Blora tahun 2005 sehingga mempunyai range 15,51 persen dengan nilai standar deviasi 3,87 persen, lebih kecil dari nilai rata-rata. Karena nilai rata-rata tingkat Inflasi lebih tinggi dari nilai standar deviasi maka dapat dikatakan bahwa tingkat Inflasi sudah terdistribusi dengan baik.

Rata-rata Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang di di eks Karesidenan Pati sebanyak 30.737 jiwa dengan jumlah minimum 1.762 jiwa di Kabupaten Blora tahun 2012 dan maksimum 146.045 jiwa di Kabupaten Kudus tahun 2013 dengan standar deviasi 34.502 jiwa. Karena nilai rata-rata Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang lebih kecil dari nilai standar deviasi maka dapat dikatakan bahwa Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang terdistribusi kurang baik.

Dengan banyaknya data yang sudah terdistribusi dengan baik, maka diharapkan akan memberikan kesimpulan yang sesuai dengan yang diharapkan karena hal tersebut memberikan indikasi awal kalau data tersebut mempunyai distribusi yang tidak mengalami nilai pencilan yang terlalu besar atau kecil. Dan yang lebih penting data tersebut dapat dipergunakan semua karena tidak perlu mengeluarkan data *outlier* yang dapat mengacaukan dalam memberikan kesimpulan analisis. Selanjutnya adalah memberikan ulasan singkat yang dapat



memberikan gambaran secara sederhana tentang variabel-variabel penelitian yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam penelitian.

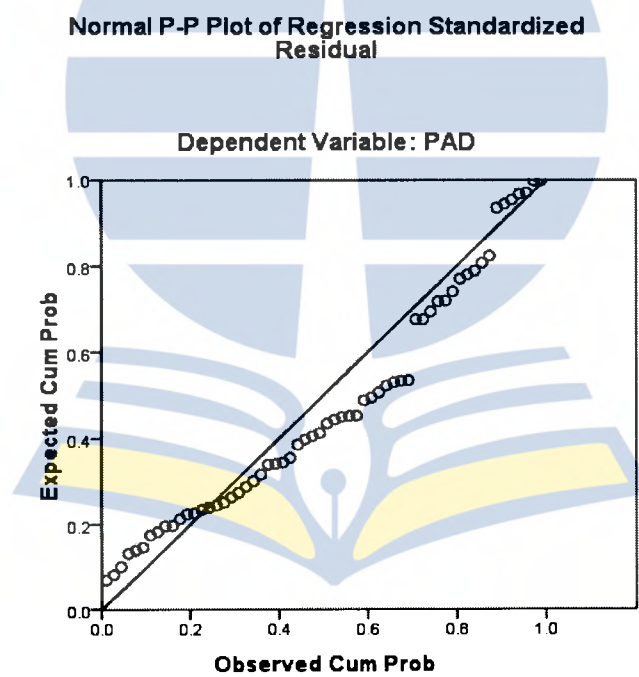
## B. Analisis Regresi

Untuk dapat dilakukan analisis regresi maka perlu dicek terlebih dahulu tentang asumsi klasik yang diperlukan dalam melakukan analisis regresi.

### 1. Uji Asumsi Klasik

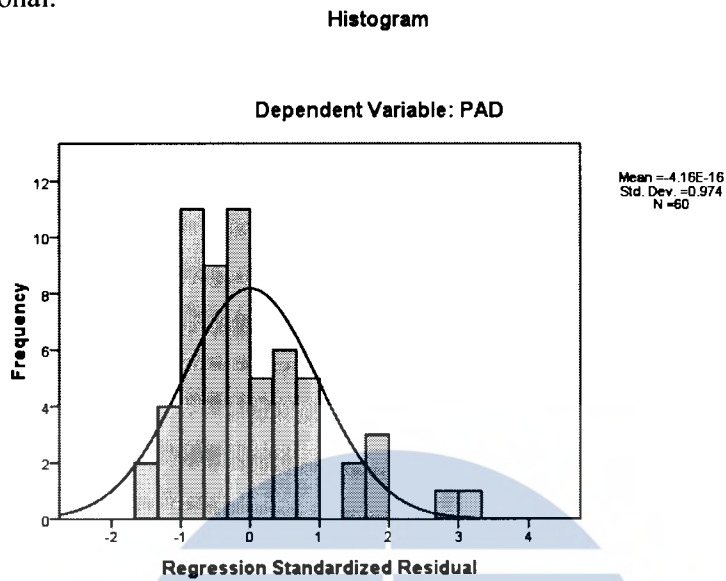
#### a Normalitas

Untuk melakukan uji normalitas dapat digunakan dengan cara melihat normalitas residual grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal serta dengan melihat grafik normal plot sebagai berikut :



Gambar 4.1  
Normal Probability Plot

Dari hasil grafik normal probability plot seperti dalam gambar 4.1. dapat disimpulkan dari pengamatan adalah berdistribusi normal. Hal ini ditandai dengan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.



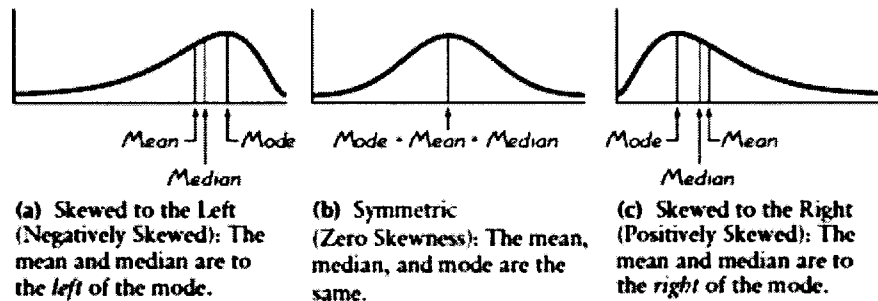
Gambar 4.2.  
Grafik histogram data observasi dengan distribusi normal

Menurut Gambar 4.2. grafik histogram menunjukkan pola tidak berdistribusi normal karena ada kecenderungan mengalami kemencengan positif (*positively skewed*). Dimana kecondongan suatu kurva dapat dilihat dari perbedaan letak mean, median dan modusnya. Jika ketiga ukuran pemusatan data tersebut berada pada titik yang sama, maka dikatakan simetris atau data berdistribusi normal. Sedangkan jika tidak berarti data tidak simetris atau tidak berdistribusi normal.

Ukuran kecondongan data terbagi atas tiga bagian, yaitu :

- Kecondongan data ke arah kiri (condong negatif) dimana nilai modus lebih dari nilai mean (modus > mean).

- Kecondongan data simetris (distribusi normal) dimana nilai mean dan modus adalah sama (mean = modus).
- Kecondongan data ke arah kanan (condong positif) dimana nilai mean lebih dari nilai modus (mean > modus).



Gambar 4.3.  
Kecondongan suatu kurva distribusi

Dari hasil pengamatan melalui grafik menghasilkan kesimpulan yang berbeda, maka untuk meyakinkan hasil dari pengamatan grafik dapat dilakukan dengan uji statistik yaitu uji normal dengan menggunakan uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesisnya adalah :

$H_0$  : data residual berdistribusi normal

$H_1$  : Data residual tidak berdistribusi normal

Setelah didapat model yang sesuai maka dihitung residual yaitu selisih antara nilai yang sebenarnya dikurangi dengan nilai yang diperoleh dari perhitungan dengan model regresi. Setelah didapatkan nilai dari residual model regresi tersebut maka dilakukan uji dengan uji non parametrik Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak pengolahan statistik SPSS sehingga menghasilkan output pengujian sebagai berikut :



Tabel 4.2.  
Uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
	N	60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.97861737E7
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.165
	Positive	.165
	Negative	-.077
	Kolmogorov-Smirnov Z	1.275
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.078

a. Test distribution is Normal.

Sumber : output SPSS, data diolah

Dari tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,078 yang berarti lebih besar daripada nilai tingkat kepercayaan (*alpha*) sebesar 5 %, sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa terima  $H_0$  yaitu data residual berdistribusi normal. Sehingga dari pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal, maka asumsi normalitas terpenuhi dan dapat dilanjutkan untuk menggunakan regresi.

Setelah memenuhi syarat normalitas data maka dapat dilanjutkan dengan melakukan analisis regresi linier dengan bantuan *software* statistik SPSS sehingga diperoleh sebuah persamaan regresi awal yang perlu diuji lebih lanjut dengan asumsi klasik yang lain yaitu heteroskedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi, apakah bisa memenuhi persyaratan tersebut ataukah tidak supaya dapat dilanjutkan untuk dapat diperoleh sebuah persamaan regresi yang memenuhi semua persyaratan asumsi klasik. Adapun persamaan regresi awal dari *output* SPSS adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.  
Ringkasan Regresi Awal Hasil Output SPSS

Y	=	73890000	+	1,829 X <sub>1</sub>	-	2595564,56 X <sub>2</sub>	-	350,86 X <sub>3</sub>
Std. Err		9219462,629		0,511		1049237,082		216,888
t-stat		8,015		3,578		-2,474		-1,618
Sig.		0,000		0,001		0,016		0,111
R	=	0,593		R <sup>2</sup>	=	0,351		
F-stat	=	10,111		Prob.	=	0,000		
DW-test	=	0,713						

Sumber : output SPSS, data diolah

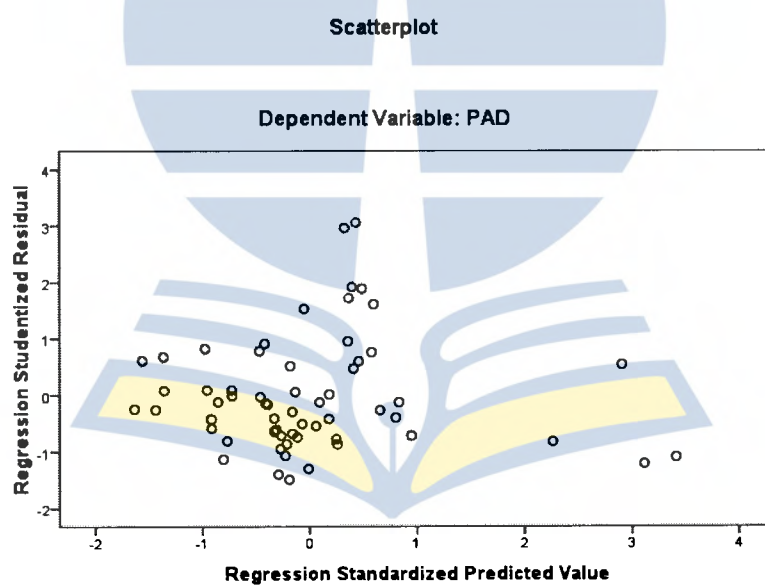
Dari hasil regresi awal seperti terlihat pada tabel 4.3. langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap asumsi klasik yaitu heteroskedastisitas, multikolinieritas dan autokorelasi sehingga diperoleh persamaan regresi yang sesuai dengan norma-norma yang dipersyaratkan sesuai dengan asumsi-asumsinya. Secara sepintas dapat dilihat bahwa persamaan regresi tersebut signifikan dengan nilai uji F sebesar 10,111 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,000 yaitu regresi berganda tersebut dapat diterima tetapi untuk lebih meyakinkan sesuai dengan uji statistik maka harus diuraikan lebih lanjut, baik mengenai uji statistik yang diterapkan maupun pemenuhan terhadap asumsi-asumsi yang berlaku untuk dapat diterapkan dalam analisis regresi sehingga model tersebut **shahih dan dapat dipergunakan** untuk analisis lebih lanjut. Untuk itu selanjutnya akan dibahas satu persatu mengenai asumsi klasik yang mendasari suatu persamaan regresi dan berikutnya dilakukan pemenuhan dengan uji statistik baik secara serempak maupun individu.

### b Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik *scatterplot* pada output SPSS. Pada prinsipnya uji heteroskedastisitas dengan metode ini adalah melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel independen yaitu ZPRED sebagai sumbu X dengan nilai residual dari model regresi tersebut yaitu SRESID sebagai sumbu Y.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan metode grafik *scatterplot* adalah sebagai berikut :

- Jika terdapat pola tertentu pada grafik *scatterplot* SPSS, seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, menyebar kemudian menyempit), maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas.
- Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar, maka indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4.4.  
Scatterplot antara nilai prediksi dengan residual yang distudentized



Dari gambar 4.4. dapat dilihat bahwa *scatterplot* titik-titik tidak ada pola khusus yang mengikuti bentuk-bentuk tertentu tetapi titik-titik tersebut menyebar. Sehingga dapat diindikasikan secara awal bahwa data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk memastikan dari hasil pengamatan dengan grafik maka dilakukan pengujian uji *glejser* dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  : Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  atau signifikansi lebih besar dari  $\alpha$

$H_1$  : Terjadi heteroskedastisitas apabila nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  atau signifikansi lebih kecil dari  $\alpha$

Tabel 4.4.  
Output uji Glejser

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.279E7	5626699.530		5.828	.000
	PDRB	.306	.312	.234	.982	.330
	INF	-1383165.794	640356.389	-.278	-2.160	.035
	IBS	-139.632	132.368	-.250	-1.055	.296

a. Dependent Variable: abs\_res

Sumber : output SPSS, data diolah

Dari hasil pada tabel 4.4. dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB dan Tenaga Kerja Industri Besar Sedang mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  (5%), sehingga dalam data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas tetapi variabel inflasi terjadi heteroskedastisitas tetapi secara serempak memberikan signifikansi 0,086 yang berarti tidak tolak  $H_0$  atau tidak terjadi heteroskedastisitas dan hal ini sejalan dengan pengamatan hasil *scatterplot* pada gambar 4.4.

### c Multikolinieritas

Multikolinieritas digunakan untuk menguji suatu model apakah terjadi hubungan yang sempurna atau hampir sempurna antara variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh antara variabel-variabel itu secara individu terhadap variabel terikat. Pengujian ini untuk mengetahui apakah antar variabel bebas dalam persamaan regresi tersebut tidak saling berkorelasi. Untuk mendeteksi multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), di mana menurut Hair et al dalam Duwi Priyatno (2009) variabel dikatakan mempunyai masalah multikolinieritas apabila nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF lebih besar dari 10.

Dari hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.5.  
Hasil perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF)

		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PDRB	.280	3.572
	INF	.960	1.041
	IBS	.283	3.534

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : output SPSS, data diolah

Dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) seperti yang tertera dalam tabel 4.5. dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami multikolinieritas, karena semua variabel bebasnya mempunyai nilai VIF kurang dari 10.

### d. Autokorelasi

. Uji Autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana dalam analisis

regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel dependen, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Sebagai contoh adalah pengaruh antara tingkat inflasi bulanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dollar. Data tingkat inflasi pada bulan tertentu, katakanlah bulan Februari, akan dipengaruhi oleh tingkat inflasi bulan Januari. Berarti terdapat gangguan autokorelasi pada model tersebut. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data *time series* (runtun waktu) dan tidak perlu dilakukan pada data *cross section* seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Beberapa uji statistik yang sering dipergunakan adalah uji *Durbin-Watson*, uji dengan *Run Test* dan jika data observasi di atas 100 data sebaiknya menggunakan uji *Lagrange Multiplier*.

Dalam analisis regresi linier di SPSS sudah ada fasilitas yang secara langsung dapat mengeluarkan nilai uji durbin-watson dan dalam analisis ini diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

Tabel 4.6.  
Output uji Durbin-watson

Model Summary <sup>b</sup>						
Change Statistics						
Model	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	.351	10.111	3	56	.000	.713

Dependent Variable: PAD

Sumber : output SPSS, data diolah

Sedangkan untuk membandingkan nilai tersebut adalah dengan membandingkan dengan nilai dalam tabel durbin-watson dengan melihat banyaknya obyek



pengamatan  $n$  dan banyaknya variabel dependen + independen  $k$ , sehingga diperoleh nilai  $d_l$  dan  $d_u$  dan sekaligus dihitung nilai  $4-d_u$  dan  $4-d_l$ .

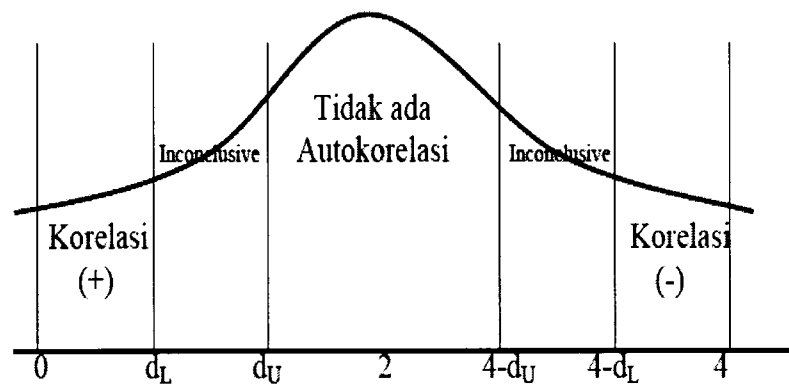
Tabel 4.7.  
Tabel uji Durbin Watson dengan  $\alpha=5\%$

**Critical Values for the Durbin-Watson Test: 5% Significance Level**

<http://www.statistikian.com>

By: Anwar Hidayat, Adaptasi Dari: <http://www.stanford.edu>

T=6 to 100, K=2 to 21 (K ≤ T-4)				T=100 to 200, K=2 to 21			
K includes intercept				K includes intercept			
T	K	dL	dU	T	K	dL	dU
6.	2.	0.61018	1.40015	100.	2.	1.65404	1.69439
7.	2.	0.69955	1.35635	100.	3.	1.63369	1.71517
7.	3.	0.46723	1.89636	100.	4.	1.61306	1.73643
8.	2.	0.76290	1.33238	100.	5.	1.59216	1.75818
8.	3.	0.55907	1.77711	100.	6.	1.57100	1.78039
8.	4.	0.36744	2.28664	100.	7.	1.54958	1.80306
55.	2.	1.52755	1.60144	139.	12.	1.55593	1.89581
55.	3.	1.49031	1.64062	139.	13.	1.53995	1.91291
55.	4.	1.45232	1.68149	139.	14.	1.52383	1.93022
55.	5.	1.41362	1.72399	139.	15.	1.50761	1.94773
55.	6.	1.37431	1.76807	139.	16.	1.49128	1.96545
55.	7.	1.33442	1.81368	139.	17.	1.47483	1.98337
55.	8.	1.29403	1.86074	139.	18.	1.45829	2.00150
55.	9.	1.25319	1.90921	139.	19.	1.44164	2.01981
55.	10.	1.21199	1.95902	139.	20.	1.42491	2.03832
60.	2.	1.54853	1.61617	144.	12.	1.56673	1.89408
60.	3.	1.51442	1.65184	144.	13.	1.55133	1.91048
60.	4.	1.47965	1.68891	144.	14.	1.53583	1.92709
60.	5.	1.44427	1.72735	144.	15.	1.52021	1.94389
60.	6.	1.40832	1.76711	144.	16.	1.50448	1.96089
60.	7.	1.37186	1.80817	144.	17.	1.48865	1.97808
60.	8.	1.33493	1.85045	144.	18.	1.47272	1.99544
60.	9.	1.29758	1.89393	144.	19.	1.45670	2.01299
60.	10.	1.25987	1.93856	144.	20.	1.44058	2.03073



Gambar 4.5. Grafik penolakan uji durbin-watson

Dengan nilai *dw-test* sebesar 0,713 dan dibandingkan dengan tabel Durbin-Watson dengan  $\alpha = 5\%$ ,  $n=60$  dan  $k=4$ , sehingga diperoleh nilai  $d_l=1,47965$  dan  $d_u=1,68891$ ,  $4-d_u=2,31109$  dan  $4-d_l=2,52035$ , maka nilai *durbin-watson-test* terletak kurang dari  $d_l$  sehingga menghasilkan kesimpulan terjadi autokorelasi positif. Untuk lebih meyakinkan hasil dari *durbin-watson* maka dapat dilakukan uji autokorelasi yang lain, yaitu dengan menggunakan uji autokorelasi dengan *run test*.

Adapun hasil dari uji *run test* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8.  
Hasil uji Autokorelasi *Run Test*

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-5.83649E6
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	20
Z	-2.865
Asymp. Sig. (2-tailed)	.004

Sumber : output SPSS, data diolah

Dengan alpha sebesar 5 %, maka kesimpulannya adalah tolak  $H_0$  yang berarti model terjadi autokorelasi, sehingga perlu dilanjutkan dengan melakukan regresi *Cochran-ortcutt* dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1). Dicari nilai  $\rho$ , dengan SPSS menghasilkan nilai sebesar 0,647

Tabel 4.9.  
Koefisien Rho yang Dipeoleh dari Output SPSS

Coefficients <sup>a,b</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	Lag_e	.647	.105	.630	6.175	.000

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Sumber : output SPSS, data diolah

2). Mendapatkan fungsi regresi linier berganda dari variabel yang sudah ditransformasikan yaitu regresikan  $Y'_t$  terhadap  $X'_t$  dimana  $Y'_t = Y_t - rY_{t-1}$  dan  $X'_t = X_t - rX_{t-1}$

Sehingga didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y' = 24210000 + 2,622 X'_1 - 855000,05 X'_2 - 736,702 X'_3$$

$$DW\text{-test} = 1,609$$

Dengan dilakukan pengembalian hasil koefisien regresi ke *original variable* dari  $\bar{Y}'_t = b'_0 + b'_1 X'_t$  menjadi  $\bar{Y} = b_0 + b_1 X$ .

Dimana :  $b_0 = \frac{b'_0}{1-r}$  dan  $b_1 = b'_1$

$$\begin{aligned} \text{Sehingga didapatkan nilai } b_0 &= 24210000 / (1 - 0,647) \\ &= 68583569,41 \end{aligned}$$

3). Menguji autokorelasi dengan *durbin-watson* tes, kalau masih tidak bisa memberikan kesimpulan, maka dilakukan dengan uji *run test* untuk menguji autokorelasi. Dengan dibandingkan nilai *dw-test* dengan hasil



tabel maka diperoleh hasil tidak terjadi autokorelasi, dimana nilai durbin-watson sebesar 1,609 dibandingkan dengan nilai tabel  $n=55$ ,  $k=4$  diperoleh nilai  $dl=1,45232$   $du=1,68149$   $4-du=2,31851$   $4-dl=2,54768$  sehingga nilai tersebut terletak antara  $dl$  dan  $du$  yang berarti tidak dapat disimpulkan dan harus dilanjutkan dengan uji *run-test* dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.10.  
Uji Autokorelasi dengan *runs test*

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-2.05532E5
Cases < Test Value	27
Cases >= Test Value	28
Total Cases	55
Number of Runs	22
Z	-1.768
Asymp. Sig. (2-tailed)	.077

a. Median

Dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0.077 maka kesimpulannya adalah tidak tolak  $H_0$  atau dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi autokorelasi. Sehingga model regresi yang dipakai adalah :

$$Y = 68583569,41 + 2,622 X_1 - 855000,05 X_2 - 736,702 X_3$$

Dari persamaan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

$b_1$  = Koefisien regresi untuk PDRB = 2,622

Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah, artinya apabila variabel Produk Domestik Regional Bruto meningkat 1 juta rupiah maka nilai Pendapatan Asli Daerah akan

naik sebesar 2.622 rupiah dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah konstan, *ceteris paribus*.

$b_2$  = Koefisien regresi untuk inflasi = - 855000,05

Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah, artinya apabila variabel inflasi menurun satu persen, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 855.000.050 rupiah dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah konstan, *ceteris paribus*.

$b_3$  = Koefisien regresi untuk tenaga kerja industri besar sedang = - 736,702

Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel jumlah tenaga kerja industri besar sedang terhadap Pendapatan Asli Daerah, artinya apabila variabel jumlah tenaga kerja industri besar sedang bertambah 1 orang, maka Pendapatan Asli Daerah akan turun sebesar 736.702 rupiah dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah konstan, *ceteris paribus*.

Besarnya  $R^2$  (koefisien determinasi) sebesar 0,331 menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam mempengaruhi variabel dependen adalah sebesar 33,1 persen artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah mampu dijelaskan oleh variabel bebas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan jumlah tenaga kerja industri besar sedang hingga sebesar 33,1 persen. Sedangkan sisanya sebesar 66,9 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model. Sedangkan besarnya koefisien korelasi berganda sebesar 0,575 ini berarti bahwa menunjukkan hubungan keeratan antara variabel-variabel bebas dengan variabel dependen cukup kuat.

## 2. Pengujian hipotesis

### a. Uji hipotesis secara serempak

Untuk menguji adanya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel dependen secara serempak digunakan uji F berdasar hasil dari ANOVA seperti yang ditampilkan pada tabel 4.11.

Tabel 4.11.  
Analisis Varian Model Regresi Cochran Orcutt

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.080E16	3	3.601E15	8.408	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2.185E16	51	4.283E14		
	Total	3.265E16	54			

a. Predictors: (Constant), IBS\_aksen, INF\_aksen, PDRB\_aksen

b. Dependent Variable: PAD\_aksen

Sumber : output SPSS, data diolah

Berdasarkan hasil anova tersebut, menghasilkan nilai hitung F sebesar 8,408 dengan signifikansi sebesar 0,000 maka apabila dibandingkan dengan tingkat kepercayaan sebesar 5 % menghasilkan keputusan untuk menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$  yang berarti bahwa secara serempak variabel bebas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan jumlah tenaga kerja industri besar sedang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal yang diajukan pada saat melakukan pembentukan kerangka pemikiran dan uji hipotesis dibuat dengan terbukti kebenarannya. Artinya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan jumlah tenaga kerja industri besar sedang secara serempak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten-kabupaten di eks Karesidenan Pati.



## b. Uji hipotesis secara parsial

Tabel 4.12.  
Uji Parsial Model Regresi Cochran Orcutt

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.421E7	3824152.508		6.331	.000
	PDRB_aksen	2.622	.550	.766	4.772	.000
	INF_aksen	-855000.050	549732.967	-.179	-1.555	.126
	IBS_aksen	-736.702	233.229	-.508	-3.159	.003

a. Dependent Variable: PAD\_aksen

Sumber : output SPSS, data diolah

1). Pengaruh antara variabel Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial

Berdasarkan hasil output SPSS pada uji t diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,772 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, artinya bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 5 persen maka diambil keputusan untuk menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Sehingga secara parsial Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah yang berarti bahwa apabila Produk Domestik Regional Bruto naik maka Pendapatan Asli Daerah juga akan ikut naik secara signifikan.

Sedangkan nilai korelasi parsialnya sebesar 0,556 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Produk Domestik Regional Bruto dengan Pendapatan Asli Daerah cukup kuat dan positif. Dan menurut koefisien determinasi parsial sebesar 0,3091 yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah mampu dijelaskan oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto

sebesar 30,91 persen. Sedangkan sisanya sebesar 69,09 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

2).Pengaruh antara variabel Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial

Berdasarkan hasil output SPSS pada uji t diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1,555 dan nilai signifikansi sebesar 0,126, artinya bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 5 persen maka diambil keputusan untuk tidak menolak  $H_0$  dan menolak  $H_1$ . Sehingga secara parsial inflasi tidak berpengaruh secara signifikan dan berhubungan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah yang berarti bahwa apabila inflasi naik maka Pendapatan Asli Daerah akan turun walaupun tidak secara signifikan.

Sedangkan nilai korelasi parsialnya sebesar -0,213 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel inflasi dengan Pendapatan Asli Daerah sangat lemah dan negatif. Dan menurut koefisien determinasi parsial sebesar 0,0454 yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah hanya mampu dijelaskan oleh variabel inflasi sebesar 4,54 persen. Sedangkan sisanya sebesar 95,46 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model. Sehingga pengaruhnya sangat kecil sekali dalam menjelaskan model dan hubungan antar variabel tersebut tidak signifikan.

3).Pengaruh antara variabel Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial

Berdasarkan hasil output SPSS pada uji t diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -3,159 dan nilai signifikansi sebesar 0,003, artinya bahwa dengan tingkat kepercayaan sebesar 5 persen maka diambil keputusan untuk menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Sehingga secara parsial jumlah tenaga kerja industri besar sedang berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah yang berarti bahwa apabila jumlah tenaga kerja industri besar sedang naik maka Pendapatan Asli Daerah turun secara signifikan.

Sedangkan nilai korelasi parsialnya sebesar -0,405 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel jumlah tenaga kerja industri besar sedang dengan Pendapatan Asli Daerah kurang kuat dan negatif. Dan menurut koefisien determinasi parsial sebesar 0,1640 yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah mampu dijelaskan oleh variabel jumlah tenaga kerja industri besar sedang sebesar 16,40 persen. Sedangkan sisanya sebesar 83,60 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

4). Pengaruh antara variabel PDRB, Inflasi dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang terhadap Pendapatan Asli Daerah secara serempak

Berdasarkan hasil anova di tabel 4.11, menghasilkan nilai hitung F sebesar 8,408 dengan signifikansi sebesar 0,000 maka menghasilkan keputusan untuk menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$  yang berarti bahwa secara serempak variabel bebas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan jumlah tenaga kerja industri besar sedang berpengaruh signifikan



terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dan terbukti kebenarannya. Artinya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan jumlah tenaga kerja industri besar sedang secara serempak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten-kabupaten di eks Karesidenan Pati.

Variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah variabel Produk Domestik Regional Bruto, karena variabel ini mempunyai nilai koefisien regresi yang terstandar adalah yang paling besar yaitu sebesar 0,766 dibandingkan dengan nilai koefisien regresi yang terstandarkan kedua variabel yang lain. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu dari Muchtolifah,2010 “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto”.

Berdasar hasil analisis tersebut, maka kesimpulannya dapat dibuat dalam tabel berikut :

Tabel 4.13  
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

	Hipotesis	Koefisien Regresi/ Signifikansi	Diterima /Ditolak
H1	PDRB berpengaruh terhadap PAD	2,622/ 0,000	diterima
H2	Inflasi berpengaruh terhadap PAD	-855000,050/ 0,126	ditolak
H3	Tenaga Kerja IBS berpengaruh terhadap PAD	-736,702/ 0,003	diterima
H4	PDRB, Inflasi, Tenaga Kerja IBS secara serempak berpengaruh terhadap PAD		diterima

Sumber : Data diolah

### **C. Pembahasan**

Dari uraian tentang analisis regresi dan uji asumsi klasik yang telah dilakukan terhadap data PAD, PDRB, Inflasi dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang di Eks Karesidenan Pati antara Tahun 2002-2013, maka dapat dilakukan pembahasan sebagai tersebut :

#### **C.1 Pengaruh PDRB terhadap PAD**

Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, artinya jika Produk Domestik Regional Bruto meningkat maka Pendapatan Asli Daerah juga ikut naik.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martini, Aryani dan Indarti, Purbayu, Muchtholifah, Gde Baskara dan Putu Lia dimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan PAD adalah berpengaruh positif dan signifikan.

#### **C.2 Pengaruh Inflasi terhadap PAD**

Inflasi tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Apabila tingkat inflasi turun maka Pendapatan Asli Daerah akan menjadi naik tetapi pengaruhnya hanya sebagian kecil karena tingkat inflasi lebih berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat secara langsung seperti misalnya kenaikan harga barang-barang.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aryanti dan Indarti dalam ASET Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.28 No.2 Oktober 2010: 133-151 dengan judul Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Periode 2000-2009 di Kota Semarang yang menghasilkan kesimpulan bahwa inflasi secara statistik tidak berpengaruh terhadap penerimaan PAD.

### **C.3 Pengaruh Tenaga Kerja Industri Besar Sedang terhadap PAD**

Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini tidak sesuai dengan teori, dimana modal pembangunan yang penting selain keuangan daerah dan investasi adalah sumber daya manusia. Tetapi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas disamping terpenuhinya kuantitas permintaan tenaga kerja.

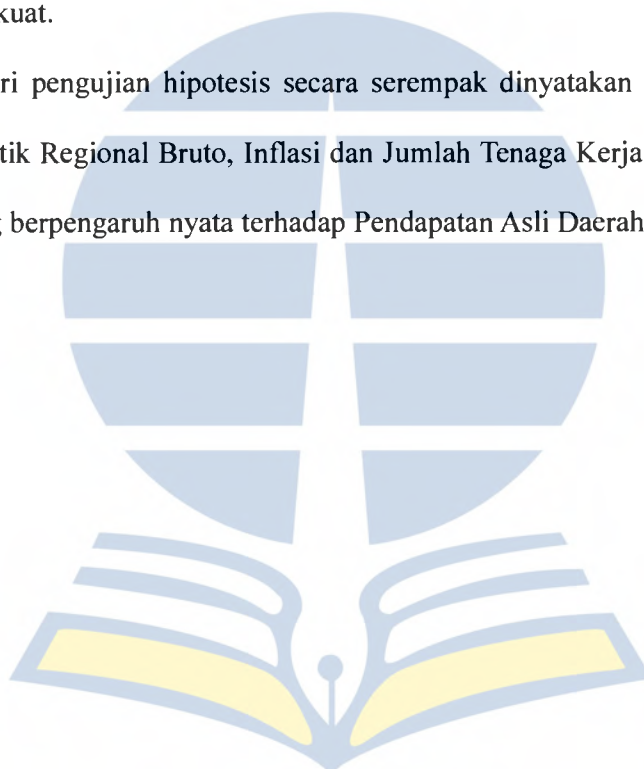
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardito Bhinadi (2003), bahwa setiap pertumbuhan tenaga kerja 1% justru akan menurunkan pertumbuhan pendapatan perkapita sebesar 0,07%. Angka negatif dari koefisien regresi pertumbuhan tenaga kerja menunjukkan bahwa *marginal productivity of labor* mengalami penurunan. Akibatnya setiap penambahan tenaga kerja didalam setiap proses produksi, justru akan menurunkan produksi. Jumlah tenaga kerja yang semakin bertambah ternyata sudah tidak lagi mampu menambah produktivitasnya. Masih relatif rendahnya pendidikan tenaga kerja di Indonesia, menyebabkan kualitas tenaga kerja di Indonesia juga relatif rendah, akibatnya produktifitas relatif rendah dan kontribusinya terhadap PAD juga relatif rendah.

### **C.4 Pengaruh PDRB, Inflasi, Tenaga Kerja Industri Besar Sedang secara serempak terhadap PAD**



Besarnya  $R^2$  (koefisien determinasi) yaitu 0,331 nilai ini menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0,331 artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah mampu dijelaskan oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang hingga sebesar 33,1 persen. Sedangkan sisanya sebesar 66,9 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model. Sedangkan besarnya koefisien korelasi berganda sebesar 0,575, ini berarti menunjukkan bahwa hubungan keeratan antara variabel bebas Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang dengan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah cukup kuat.

Dari pengujian hipotesis secara serempak dinyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang berpengaruh nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat PDRB, Inflasi dan Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang di 5 kabupaten Eks Karesidenan Pati.

Berdasarkan uraian rumusan masalah, hipotesis yang diajukan serta hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama bahwa PAD dipengaruhi oleh tingkat PDRB dapat diterima dengan memberikan hasil konstanta yang positif, artinya bila ada kenaikan PDRB maka PAD juga akan mengalami kenaikan sesuai besaran konstanta variabel PDRB.
2. Hasil pengujian hipotesis yang kedua bahwa Inflasi berpengaruh terhadap PAD adalah ditolak, sehingga variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PAD
3. Hasil pengujian yang ketiga bahwa Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang berpengaruh terhadap PAD dapat diterima dan memberikan hasil yang signifikan negatif, artinya untuk setiap penambahan jumlah tenaga kerja tidak selalu menaikkan PAD.
4. Hasil pengujian yang keempat bahwa PAD (Y) secara serempak dipengaruhi oleh  $X_1$  (Produk Domestik Regional Bruto),  $X_2$  (Inflasi), dan  $X_3$  (Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar. Sedang), adalah dapat diterima dengan nilai koefisien determinan ( $R^2$ ) sebesar 0,331 yang berarti bahwa variabel  $X_1$  (Produk Domestik Regional Bruto),  $X_2$  (Inflasi), dan  $X_3$  (Jumlah Tenaga

Kerja Industri Besar Sedang), secara bersama-sama dapat menjelaskan atau berpengaruh sebesar 33,1 % terhadap variabel dependen Y (Pendapatan Asli Daerah), sedangkan 66,9 % dijelaskan oleh faktor diluar variabel independen tersebut.

5. Variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah variabel Produk Domestik Regional Bruto, karena variabel ini mempunyai nilai koefisien regresi yang terstandar adalah yang paling besar yaitu sebesar 0,766 dibandingkan dengan nilai koefisien regresi yang terstandarkan kedua variabel yang lain.

## **B. Keterbatasan**

Dalam penelitian ini memiliki adanya keterbatasan, yaitu :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Eks Karesidenan Pati di 5 kabupaten, dan hanya menggunakan 3 variabel bebas dengan nilai koefisien determinasi sebesar 33,1 persen. Kedepannya dapat ditambahkan variabel-variabel lain sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik dengan memasukkan beberapa variabel makro yang berhubungan dengan PAD.
2. Dalam penelitian ini data jumlah tenaga kerja industri besar sedang masih digabung, kedepannya dapat dikaji untuk dipisahkan menurut pengelompokan industri pengolahan menurut jumlah tenaga kerja industri sedang (tenaga kerja 20-99 orang) dan industri besar (tenaga kerja 100 orang lebih) sehingga dapat menjelaskan fenomena hubungan jumlah tenaga kerja dengan PAD secara lebih spesifik.



### C. Saran

Dalam upaya untuk meningkatkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka hal utama yang dilakukan, selain meningkatkan dan menggali sumber-sumber penerimaan PAD (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba dari BUMD dan Pendapatan Lain-lain yang Sah), maka bisa ditingkatkan dari sektor yang paling dominan yaitu Pertanian dan Industri Pengolahan sebagai potensi dan tantangan bagi pemerintah daerah untuk mendorong tingkat kemandirian daerah seperti yang dicita-citakan dilakukannya otonomi daerah.



### DAFTAR PUSTAKA

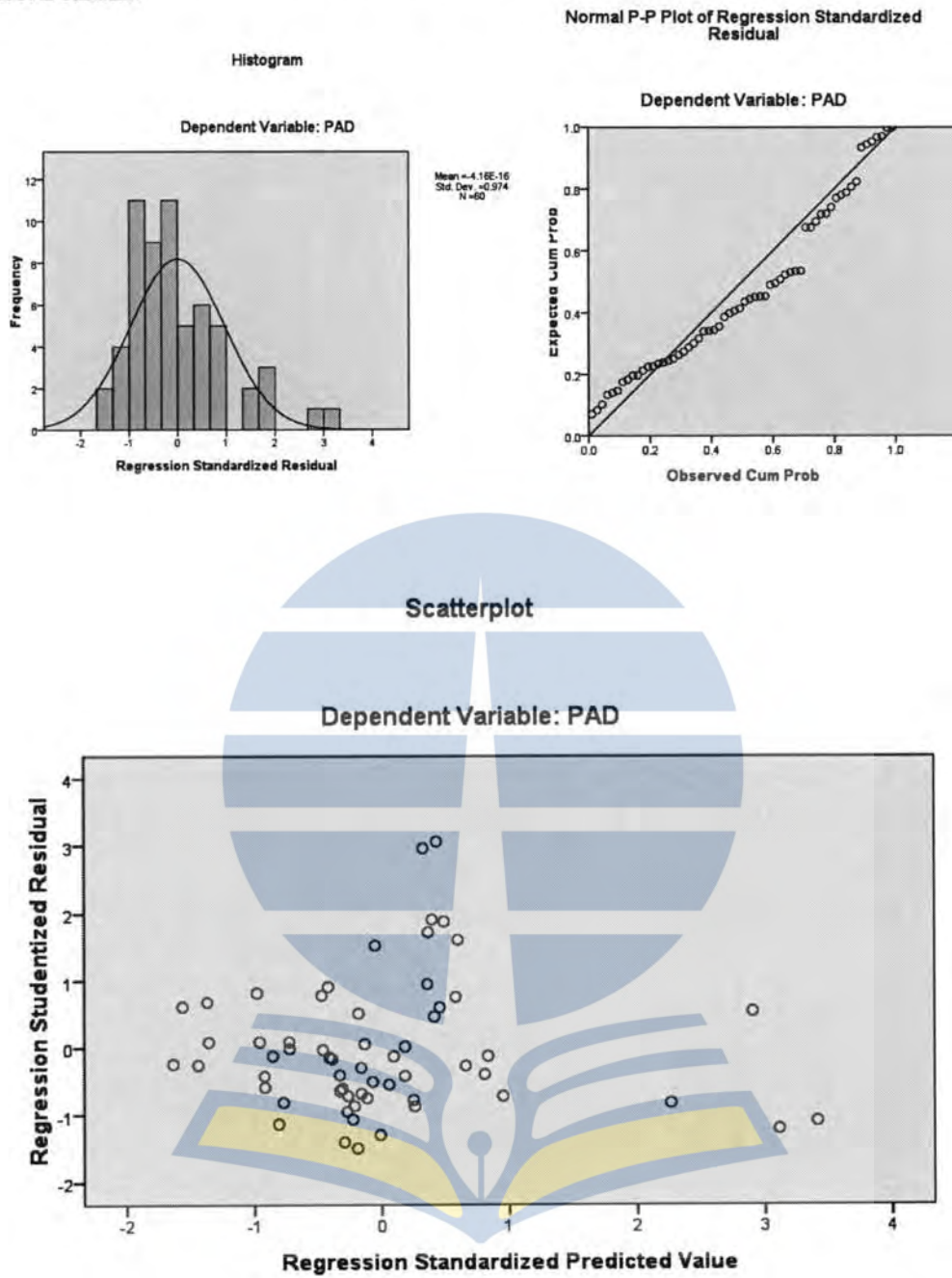
- Anonim. (2014, Oktober 2). *UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Retrieved 03 1, 2016, from <http://www.hukumonline.com/http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt543df13291bf4/nprt/lt511c7ca43835e/undang-undang-nomor-23-tahun-2014>
- Aryanti, E., & Indarti, I. (2010). *Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang*. ASET Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.28 No.2 Oktober 2010, 133-151.
- BPS (2007). *Statistik Indonesia 2007*. Jakarta : BPS.
- BPS Kab. Pati. (1996-2014). *Pati Dalam Angka*. Pati: BPS Kabupaten Pati.
- BPS Prov. Jawa Tengah. (1996-2014). *Jawa Tengah Dalam Angka*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- BPS, K. P. (2014). *Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kabupaten Pati 2013*. Pati: BPS Kabupaten Pati.
- BPS, K. P. (2015). *Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kabupaten Pati 2014*. Pati: BPS Kabupaten Pati.
- Ghozali, I. (2009). *Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit – UNDIP.
- Gujarati, D. (1997). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, D., & Porter, D. C. (2010). *Dasar – dasar Ekonometrika (Basic Econometrics)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UU AMP YKPN.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Husna, U. (2015). *Pengaruh PDRB, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Kota se Jawa Tengah*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Jaya, G. B., & Widanta, A. B. (2014). *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap PAD Kota Denpasar*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.3 No.5 Mei 2014, 201-208.
- Kuncoro, M. (2011). *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, M. (2012). *Mudah Memahami dan Menganalisis: Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mansoer, F. (2000). *Makroekonomika*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Martini, S. (2008). *Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Jumlah Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Wonogiri*. Surakarta: MM-UMS.
- Muchtholifah. (2010). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto*. Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan Vol.1 No. 1 Januari 2010, 1-10.

- Novalistia, R. L. (2016). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Journal Of Accounting Volume 2 No.2 Maret 2016, 1-25.
- Pratiwi, I. E. (2015). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2013*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Republik, I. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik, I. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Santiso, P. B., & Rahayau, R. P. (2015). *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*. Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol.2 No. 1 Juli 2015, 9-18.
- Sari, P. L. (2013). *Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Jinah Vol.2 No.2 Juni 2013, 715-733.
- Sumarni, R. (2012). *Analisis Peranan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990-2009*. Yogyakarta: UAJY.
- Susanto, I. (2014). *Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang Tahun 1998-2012*. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Malang.
- Triani, & Kuntari, Y. (2010). *Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 di Kabupaten Karanganyar*. Jurnal Ilmu Ekonomi ASET Vol 12, No 1 (2010), 57-64.
- Wulandari, P. P., & Ayuningsasi, A. A. (2014). *Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali*. e-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 3, No. 11, November 2014, 530-539.
- Yeny Kurniawati Gitaningtyas, T. K. (2014). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur*. Artikel Ilmiah Mahasiswa 2014 (pp. 1-7). Jember: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ).
- Yusup Saputra Eman (2015, 22 Mei). *Teori Inflasi*. Diambil tanggal 6 Juni 2016, dari <http://ekonomikelasx.blogspot.co.id/2013/05/teori-inflasi.html>



### Lampiran 1 Uji Normalitas Data

```
REGRESSION /MISSING LISTWISE /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN /DEPENDENT PAD /METHOD=ENTER PDRB INF IBS
/SCATTERPLOT=(*SRESID,*ZPRED) /RESIDUALS HIST(ZRESID) NORM(ZRESID)
/SAVE RESID.
```



## Lampiran 2

### Uji Non Parametrik Kolmogorov-Smirnov

NPAR TESTS /K-S(NORMAL)=RES\_1 /MISSING ANALYSIS.

		Unstandardized Residual
	N	60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.97861737E7
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.165
	Positive	.165
	Negative	-.077
	Kolmogorov-Smirnov Z	1.275
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.078

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



### Lampiran 3 Model Awal Regresi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.593 <sup>a</sup>	.351	.317	3.057E7

a. Predictors: (Constant), IBS, INF, PDRB

b. Dependent Variable: PAD

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.351	10.111	3	56	.000	.713

b. Dependent Variable: PAD

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.836E16	3	9.452E15	10.111	.000 <sup>a</sup>
	Residual	5.235E16	56	9.347E14		
	Total	8.070E16	59			

a. Predictors: (Constant), IBS, INF, PDRB

b. Dependent Variable: PAD

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.389E7	9219462.629		8.015	.000
	PDRB	1.829	.511	.728	3.578	.001
	INF	-2595564.560	1049237.082	-.272	-2.474	.016
	IBS	-350.860	216.888	-.327	-1.618	.111

a. Dependent Variable: PAD

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		95.0% Confidence Interval for B		Correlations		
		Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	5.542E7	9.236E7			
	PDRB	.805	2.852	.480	.431	.385
	INF	-4697439.006	-493690.114	-.348	-.314	-.266
	IBS	-.785.339	83.620	.284	-.211	-.174

a. Dependent Variable: PAD

**Coefficients<sup>a</sup>**

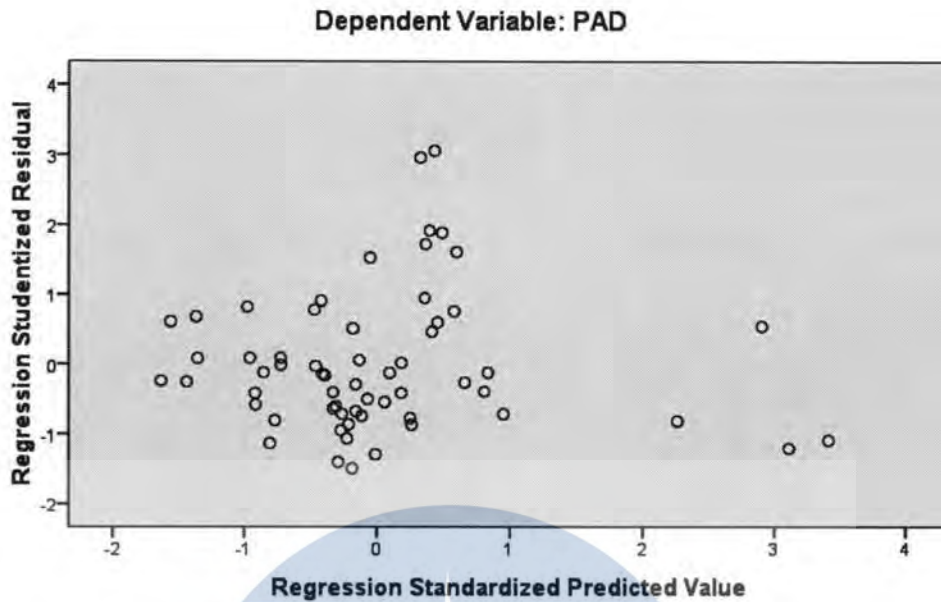
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PDRB	.280	3.572
	INF	.960	1.041
	IBS	.283	3.534

a. Dependent Variable: PAD



**Lampiran 4**  
**Uji Heteroskedastisitas**

**Scatterplot**



**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.413E15	3	8.043E14	2.310	.086 <sup>a</sup>
	Residual	1.950E16	56	3.482E14		
	Total	2.191E16	59			

a. Predictors: (Constant), IBS, INF, PDRB

b. Dependent Variable: abs\_res

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.279E7	5626699.530		5.828	.000
	PDRB	.306	.312	.234	.982	.330
	INF	-1383165.794	640356.389	-.278	-2.160	.035
	IBS	-139.632	132.368	-.250	-1.055	.296

a. Dependent Variable: abs\_res

## Lampiran 5 Uji Runs Autokorelasi

NPAR TESTS /RUNS(MEDIAN)=RES\_1 /MISSING ANALYSIS.

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-5.83649E6
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	20
Z	-2.865
Asymp. Sig. (2-tailed)	.004

a. Median

## Rho Cochran-Orcutt

REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA  
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /ORIGIN /DEPENDENT RES\_1  
/METHOD=ENTER Lag\_e /SCATTERPLOT=(\*SRESID,\*ZPRED).

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	Lag_e	.647	.105	.630	6.175	.000

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

b. Linear Regression through the Origin

## Lampiran 6

### Regresi Cochran-Orcutt

```
GET FILE='G:\Revisi\Data Setelah Rev.sav'. REGRESSION /DESCRIPTIVES MEAN
STDDEV CORR SIG N /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R
ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN
/DEPENDENT PAD_aksen /METHOD=ENTER PDRB_aksen INF_aksen IBS_aksen
/SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED) /RESIDUALS DURBIN HIST(ZRESID)
NORM(ZRESID) /SAVE PRED RESID.
```

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.575 <sup>a</sup>	.331	.292	2.06966E7

a. Predictors: (Constant), IBS\_aksen, INF\_aksen, PDRB\_aksen

b. Dependent Variable: PAD\_aksen

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.331	8.408	3	51	.000	1.609

b. Dependent Variable: PAD\_aksen

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.080E16	3	3.601E15	8.408	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2.185E16	51	4.283E14		
	Total	3.265E16	54			

a. Predictors: (Constant), IBS\_aksen, INF\_aksen, PDRB\_aksen

b. Dependent Variable: PAD\_aksen

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.421E7	3824152.508		6.331	.000
	PDRB_aksen	2.622	.550	.766	4.772	.000
	INF_aksen	-855000.050	549732.967	-.179	-1.555	.126
	IBS_aksen	-736.702	233.229	-.508	-3.159	.003

a. Dependent Variable: PAD\_aksen

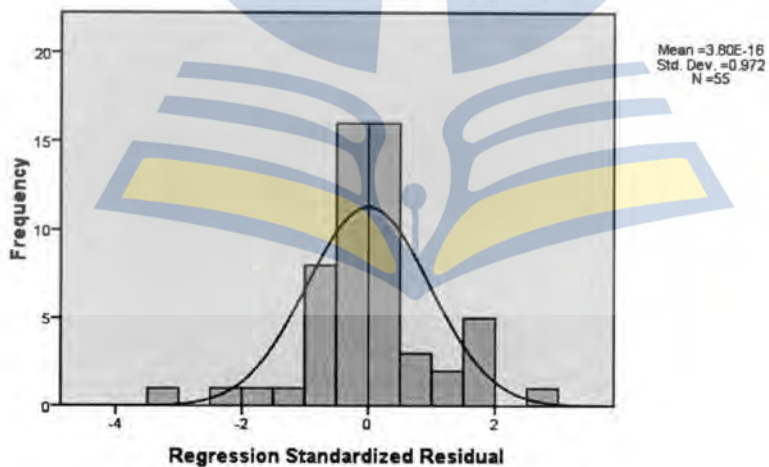
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	PDRB_aksen	.399	.556	.547	.509	1.964
	INF_aksen	-.177	-.213	-.178	.992	1.008
	IBS_aksen	.012	-.405	-.362	.507	1.972

a. Dependent Variable: PAD\_aksen

**Histogram**

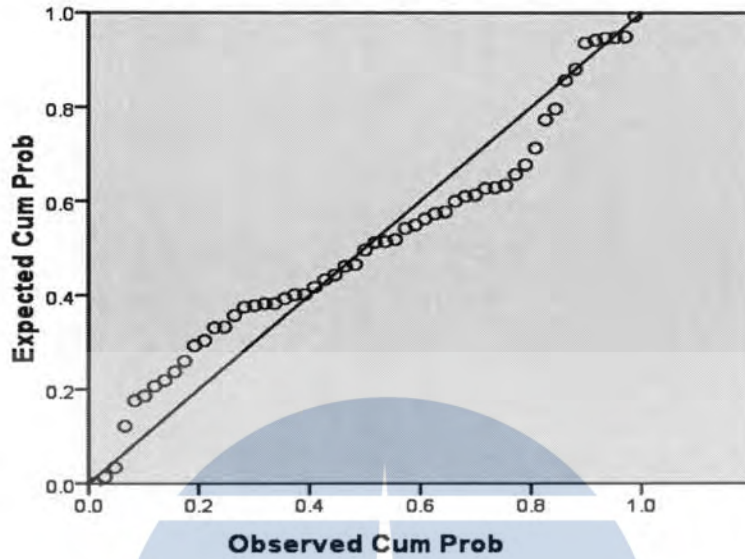
Dependent Variable: PAD\_aksen





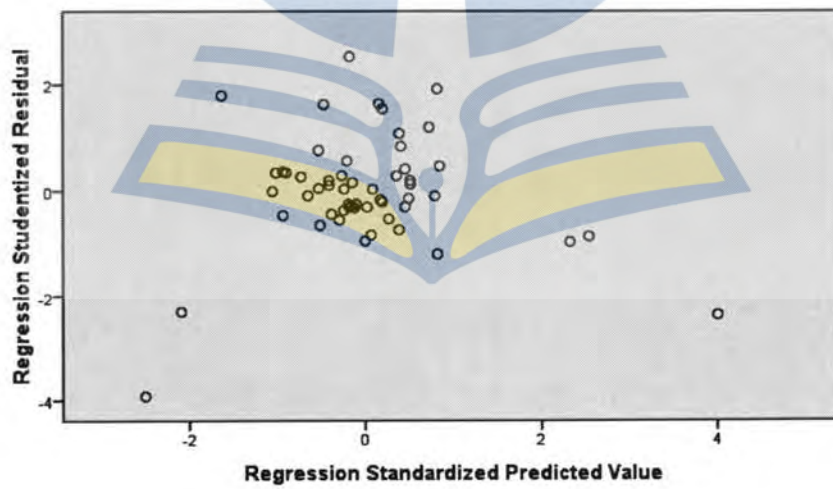
### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: PAD\_aksen



Scatterplot

Dependent Variable: PAD\_aksen



**Lampiran 7**  
**Runs test Cochran-Orcutt**

GET FILE='H:\Revisi\Data Setelah Rev.sav'. NPAR TESTS /RUNS(MEDIAN)=RES\_1 /MISSING ANALYSIS.

**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-2.05532E5
Cases < Test Value	27
Cases >= Test Value	28
Total Cases	55
Number of Runs	22
Z	-1.768
Asymp. Sig. (2-tailed)	.077

a. Median

